



Kementerian PPN/
Bappenas

KONSEP RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2023

BAB 1

Evaluasi, Tantangan dan Sasaran Makro Pembangunan

Evaluasi Pembangunan	04
Isu dan Tantangan Pembangunan	07
Kerangka Ekonomi Makro	08

BAB 2

Transformasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Sasaran dan Indikator Utama Visi Indonesia Emas 2045 di tahun 2025 – 2029	10
Tema dan Arahan RPJMN Tahun 2025 – 2029	11
Upaya Transformatif Super Prioritas (<i>Game Changer</i>)	12

BAB 3

Agenda Pembangunan

Transformasi Sosial	14
Transformasi Ekonomi	19
Transformasi Tata Kelola	32
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	36
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	41

BAB 4

Arah Pembangunan Wilayah dan Dukungan Sarpras

Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	48
<i>Highlight</i> Intervensi Umum Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	50
Arah Pembangunan Wilayah Sumatera	51
Arah Pembangunan Wilayah Jawa	66
Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusra	79
Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan	87
Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi	99
Arah Pembangunan Wilayah Maluku	112
Arah Pembangunan Wilayah Papua	118

BAB 5

Kerangka Implementasi: Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Kelembagaan	133
Kerangka Regulasi	134
Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	135



Kementerian PPN/
Bappenas

01.



■ KONSEP RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029

EVALUASI, TANTANGAN, DAN SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN

Evaluasi Pembangunan (1/3)

Evaluasi Paruh Waktu RPJMN Tahun 2020–2024

Agenda Pembangunan



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Gambaran Indikator Pembangunan yang Perlu Menjadi Perhatian*

(Berdasarkan Evaluasi Kinerja)

- | | |
|---|---|
| 1. Rasio Gini (nilai) | 9. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) |
| 2. Pertumbuhan Investasi (%) | 10. Nilai Devisa Pariwisata (USD Milliar) |
| 3. <i>Share</i> industri pengolahan (%) | 11. Rasio Kewirausahaan Nasional (%) |
| 4. Tingkat inflasi (%) | 12. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
| 5. Tingkat Kemiskinan (%) | 13. Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) |
| 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 14. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) |
| 7. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 15. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%) |
| 8. Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi | 16. Prevalensi <i>stunting</i> pada balita (%) |
| | 17. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca, (b) Matematika, (c) Sains |

*) Merupakan indikator dengan kinerja stagnan/menurun/moderat

Kinerja Pembangunan yang Perlu Ditingkatkan Berdasarkan Persepsi Masyarakat

(Berdasarkan Survei Persepsi)



- o Penurunan **kemiskinan: bansos, subsidi, sistem pelayanan terpadu.**
- o Penciptaan dan perluasan **lapangan kerja.**



- o Kesejahteraan di **desa, daerah tertinggal, transmigrasi, dan terluar.**
- o Kemudahan **akses pangan.**



- o Peningkatan **kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan.**
- o Perlindungan **anak dan perempuan.**



- o Peningkatan **infrastruktur pelayanan dasar.**
- o Efisiensi pemanfaatan **energi dan ketenagalistrikan.**



- o Penanganan pencemaran dan kerusakan **lingkungan.**
- o Penguatan kelompok masyarakat **tangguh bencana dan perubahan iklim.**



- o Penguatan sistem **anti-korupsi dan penegakan hukum.**
- o Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola **pelayanan publik.**

Evaluasi Pembangunan (2/3)

Evaluasi Pembangunan Daerah

Kinerja Makro Daerah (*)

Wilayah	Ketercapaian terhadap Target RKP			Ketercapaian terhadap Target RKP		
	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumatera	Blue	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue
Jawa - Bali	Blue	Yellow	Blue	Blue	Yellow	Blue
Kalimantan	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue
Nusa Tenggara	Orange	Yellow	Blue	Orange	Yellow	Blue
Sulawesi	Blue	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue
Maluku	Blue	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue
Papua	Orange	Yellow	Blue	Orange	Yellow	Blue

- Pada indikator pertumbuhan ekonomi, wilayah Nusa Tenggara dan Papua memiliki kinerja yang masih kurang optimal baik ketercapaian terhadap target RKP dan RKP.
- Ketercapaian target RKP untuk indikator tingkat kemiskinan masih perlu dioptimalkan di semua wilayah.
- Semua wilayah memiliki ketercapaian target RKP dan RKP yang baik untuk indikator tingkat pengangguran terbuka.

*) Keterangan: merupakan hasil ketercapaian target RKP dan RKP tahun 2023.

Blue	Capaian >=90% dari target
Yellow	Capaian antara >=60% dan <90% dari target
Orange	Capaian <60% dari target

Sumber: EPD, 2023

Pemetaan Faktor Pendukung Pencapaian Pembangunan EKPD

Wilayah	Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi							Dimensi Sosio-Demografi							Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola									
	Mantap Jalan	Jarak Pelabuhan Utama	Indeks Risiko Bencana	Proporsi PDRB Primer	Proporsi PDRB Sektor Manufaktur	Realisasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan PMA dan PMDN	Ketahanan Sosial (IPK)	Kepuasan Hidup Sosial	Partisipasi dan Kepemimpinan	Tingkat Kejahatan	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angkatan Kerja	Lulusan Perguruan Tinggi	Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian	Rasio Belanja terhadap APBD	Rasio PAD terhadap PDRB	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	SAKIP	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai Pilar Kapabilitas Inovasi (IDSD)
Sumatera	Blue	Green	Orange	Green	Orange	Blue	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Blue	Green	Yellow	Orange	Orange	Orange	Green	Green	Orange	Orange
Jawa - Bali	Orange	Green	Yellow	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Green	Green	Green	Green	Green
Kalimantan	Blue	Green	Orange	Green	Orange	Blue	Orange	Green	Orange	Orange	Green	Green	Green	Orange	Blue	Green	Yellow	Orange	Orange	Orange	Green	Green	Blue	Blue
Nusa Tenggara	Blue	Green	Orange	Green	Orange	Blue	Orange	Green	Blue	Green	Yellow	Green	Yellow	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Blue	Orange	Orange	Green	Orange	Orange
Sulawesi	Blue	Yellow	Blue	Green	Orange	Blue	Orange	Green	Green	Yellow	Green	Green	Orange	Orange	Blue	Green	Orange	Orange	Orange	Blue	Green	Green	Green	Orange
Maluku	Blue	Orange	Blue	Green	Orange	Blue	Yellow	Green	Green	Green	Orange	Green	Blue	Orange	Orange	Orange	Yellow	Orange	Orange	Blue	Green	Yellow	Yellow	Orange
Papua	Blue	Blue	Orange	Green	Orange	Blue	Yellow	Green	Orange	Green	Blue	Green	Blue	Blue	Orange	Green	Yellow	Orange	Orange	Blue	Green	Yellow	Blue	Blue

- Hampir semua wilayah memiliki kondisi mantap jalan, realisasi PMA dan PMDN, dan produktivitas tenaga kerja yang masih belum optimal sehingga perlu menjadi prioritas untuk diberikan intervensi lebih lanjut.
- Wilayah Papua masih memiliki capaian indikator faktor pendukung yang kurang optimal sehingga membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Keterangan Faktor Pendukung:

Green	Sangat Baik
Light Green	Baik

Yellow	Cukup
Orange	Kurang
Blue	Sangat Kurang

Evaluasi Pembangunan (3/3)

Isu Strategis Kewilayahan*

WILAYAH SUMATERA

- Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dll.
- Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
- Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
- Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.
- Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera.

WILAYAH KALIMANTAN

- Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
- Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA.
- Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar.
- Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar.
- Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
- Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan.
- Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah.

WILAYAH SULAWESI

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja salah satunya karena *mismatch* antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.
- Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan.
- Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antardaerah.
- Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam (gempa, tsunami, banjir, dan likuefaksi).

WILAYAH PAPUA

- Masih minimnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T.
- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antardaerah.
- Belum optimalnya akses, kualitas dan tata kelola Pendidikan.
- Belum merata dan memadainya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- Kurangnya persiapan dalam pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB).
- Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan.
- Tingginya kerentanan sosial Masyarakat.
- Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah.
- Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah seperti sektor pertanian.
- Tingginya kerawanan pangan.
- Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi *stunting*.

WILAYAH JAWA-BALI

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

WILAYAH NUSA TENGGARA

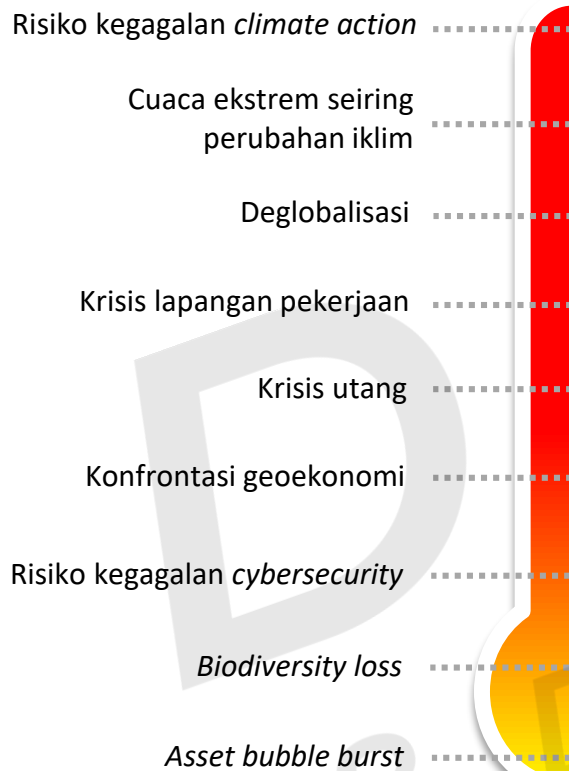
- Sektor pariwisata belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep *quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata.
- Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
- Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
- Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
- Rendahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanian.
- Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.

WILAYAH MALUKU

- Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan pada sektor perikanan, pertanian (cengkeh, dll), dan pertambangan (minyak).
- Belum optimalnya infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas dalam dan antarpulau.
- Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (tenaga pendidik dan kesehatan, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum yang relevan).
- Belum optimalnya diversifikasi ekonomi khususnya pada pengembangan sektor pariwisata.
- Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengelolaan SDA).
- Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana.

Isu dan Tantangan Pembangunan

Risiko Global Jangka Menengah



- Usia produktif negara maju menurun
- Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

Aging Population Negara Maju

Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

- Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar

Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

- Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional

Isu Jangka Menengah

Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

- Perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau.
- Perlunya Pembangunan PLT EBT di luar P. Jawa untuk mendorong pemerataan

Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

- Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global

Sumber:
World Economic Forum Global Risks Report, 2022 dan Oxford Economics

Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi:

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan

Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas.

Sektor listrik dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor industri dan pembangunan IKN.

Sektor jasa-jasa produktif: dan transportasi akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolahan

Sektor infokom berkembang seiring dengan transformasi digital

Industri Pengolahan

5,8 – 7,0



Pertanian

3,5 – 4,0



Listrik

5,6 – 6,1



Konstruksi

6,4 – 6,7



Transportasi

7,4 – 8,6



Perdagangan

5,2 – 5,6



Infokom

7,8 – 8,5



Pertambangan

3,9 – 4,1



Rata-rata 2025-2029

(Skenario Transformatif Dan Super Transformatif)



PERTUMBUHAN EKONOMI

5,6 – 6,1

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran:



Konsumsi RT dan LNPRT

5,4 – 5,6

Konsumsi RT dan LNPRT tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.



Konsumsi Pemerintah

5,0 – 5,7

Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam pembangunan



PMTB / Investasi

6,4 – 6,7

Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industri pengolahan



Ekspor Barang dan Jasa

7,2 – 7,9

Ekspor tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan sektor industri.



Impor Barang dan Jasa

7,4 – 8,3

Impor tumbuh tinggi seiring kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.



Kementerian PPN/
Bappenas

02.

**TRANSFORMASI
PEMBANGUNAN MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**

■ KONSEP RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029

Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tecermin dalam lima sasaran visi

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju

Baseline 2025 Target 2029

➤ GNI Per Capita (USD)	5.500	7.400-7.670
➤ Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
➤ Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9-23,0

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

Baseline 2025 Target 2029

➤ Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	4,5-5,0
➤ Rasio Gini (index)	0,379-0,382	0,372-0,375
➤ Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	23,3

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Baseline 2025 Target 2029

➤ Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	29
----------------------------------	-----------	----

Sumber: Pareto Economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Baseline 2025 Target 2029

➤ Index Modal Manusia (index)	0,54 (2022)	0,61
-------------------------------	-------------	------

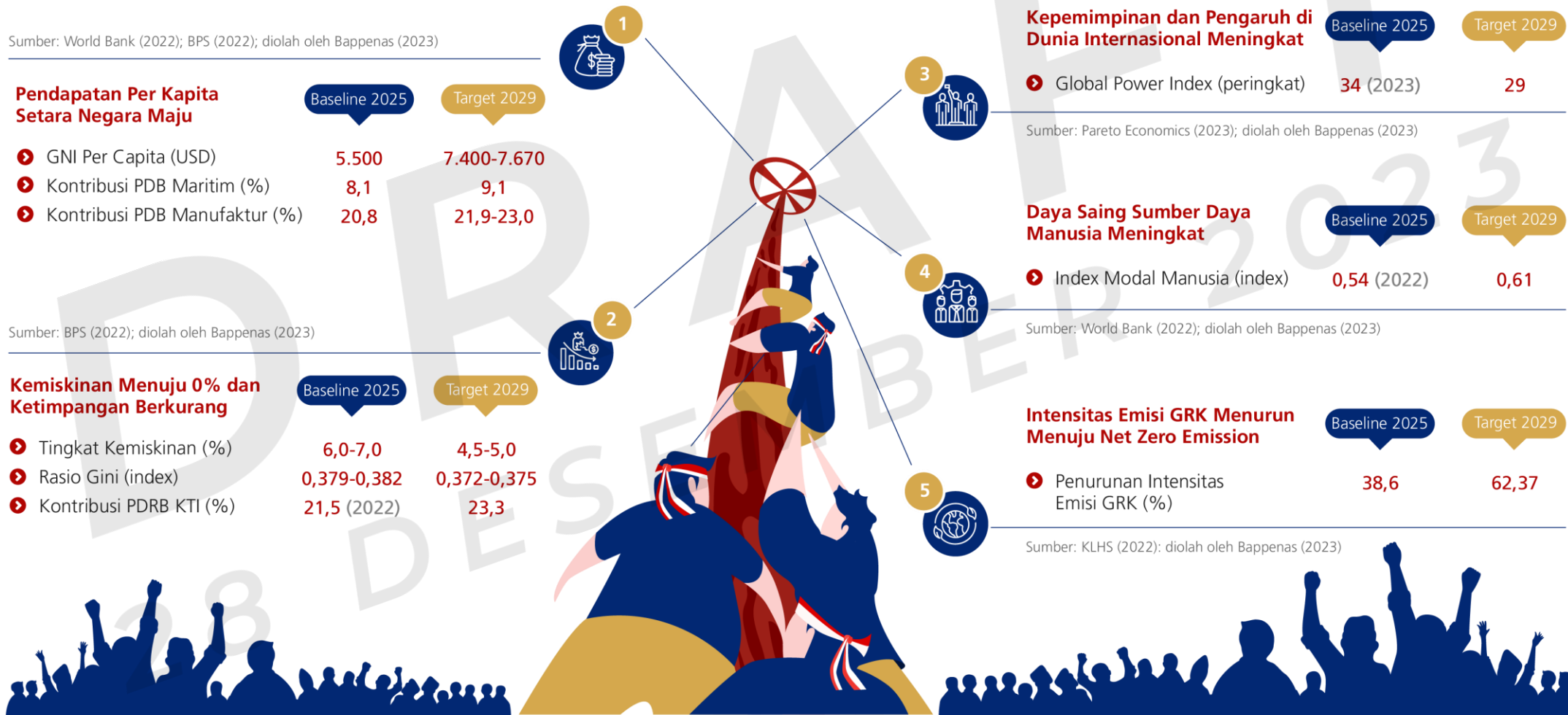
Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission

Baseline 2025 Target 2029

➤ Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37
--------------------------------------	------	-------

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)



Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029

Penguatan Fondasi Transformasi

➤ **Transformasi Sosial:**

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

➤ **Transformasi Ekonomi:**

Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

➤ **Transformasi Tata Kelola**

Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: ◀

Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gantar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: ◀

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.



Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*)



Transformasi Sosial

- ▶ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- ▶ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- ▶ Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- ▶ Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
- ▶ Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.



Transformasi Ekonomi

- ▶ Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- ▶ Industrialisasi : hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- ▶ Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- ▶ *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- ▶ Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- ▶ Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).



Transformasi Tata Kelola

- ▶ Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- ▶ Penguatan integritas partai politik.



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- ▶ Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
- ▶ Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
- ▶ Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- ▶ Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- ▶ Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- ▶ Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- ▶ Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).



Kementerian PPN/
Bappenas

03.



AGENDA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2025-2029

■ KONSEP RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029

TRANSFORMASI SOSIAL



Isu Strategis Transformasi Sosial



Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah

- 1 AKI masih tinggi (189/100.000)
- 2 Stunting masih tinggi (21,6%)
- 3 Prevalensi obesitas 21,8%
- 4 Kasus baru TB peringkat ke-2 dunia
- 5 Kasus Kusta peringkat ke-3 dunia
- 6 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
- 7 24,7% RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- 8 36,5% Rumah Sakit terakreditasi paripurna
56,4% FKTP terakreditasi



Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- 1 Layanan pendidikan belum merata
- 2 Kualitas pendidikan masih rendah
- 3 Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas
- 4 Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah
- 5 Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah
- 6 Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah



Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

- 1 Akurasi program bantuan sosial masih rendah
- 2 Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
- 3 Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
- 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
- 5 Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
- 6 Program Jaminan Sosial belum optimal

Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial (1/2)



Kesehatan untuk Semua

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
1. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,36 (2022)	75,4
2. Kesehatan Ibu dan Anak		
a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	77
b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,6 (2022)	11
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	354 (2021)	190
4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95 (2023)	98



Pendidikan Berkualitas yang Merata (1/2)

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
5. Hasil Pembelajaran		
a. Rata-rata nilai PISA:		
1. Membaca	359	409
2. Matematika	366	416
3. Sains	383 (2022)	426
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,08 (2022)	9,97
c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,10 (2022)	13,66



Highlight Intervensi

- Investasi pelayanan kesehatan primer** melalui (a) pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat (SPA) dan SDM di puskesmas dan pustu, (b) peningkatan kompetensi kader
- Penurunan kematian ibu** melalui (a) penguatan kapasitas pelayanan emergensi PONEC-PONEK; (b) peningkatan cakupan dan kualitas ANC, KF, KN sesuai standar; (c) penguatan deteksi dini, manajemen risiko dan tata laksana kasus
- Penurunan *stunting*** melalui: (a) penanggulangan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil; (b) penyediaan PMT bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia (*weight flatering*); (c) suplementasi gizi mikro pada balita
- Pengendalian penyakit menular** melalui: (a) penemuan dan pengobatan TBC; (b) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB; (c) peningkatan kapasitas penemuan kasus TB
- Pengendalian penyakit tidak menular (PTM)** melalui (a) peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM, (b) pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM melalui pengendalian konsumsi GGL (gula, garam, lemak), pangan cepat saji, dan pengendalian konsumsi rokok.
- Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional** melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melayani skema JKN
- Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan** melalui regulasi/peraturan perundangan yang memberikan fleksibilitas pemerintah pusat untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama daerah sulit akses



Highlight Intervensi

- Percepatan Wajib Belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**
- Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas** salah satunya melalui **restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru**
- Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan**

Catatan: *Baseline* dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik

Sasaran Pembangunan Transformasi Sosial (2/2)



Pendidikan Berkualitas yang merata (2/2)

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,16 (2022)	38,04
7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	57,53 (2022)	67,66



Highlight Intervensi

- Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM** melalui (a) penyaluran beasiswa dan subsidi pendidikan tinggi; (b) peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; dan (c) penguatan dan pemerataan kualitas kelembagaan perguruan tinggi.
- Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja** melalui (a) penguatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi (pembelajaran, pendidik/instruktur, dan sertifikasi); (b) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; (c) pengembangan manajemen talenta; dan (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi



Perlindungan Sosial yang Adaptif

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
8. Terbangunnya system perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk	0 (2023)	1
9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	28,08 (2022)	52,60
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20 (2022)	28



Highlight Intervensi

- Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
- Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
- Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan
- Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk perluasan cakupan secara inklusif serta penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Catatan: Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik

Kebutuhan Kelembagaan Dan Regulasi Transformasi Sosial

Kesehatan untuk Semua

Kerangka Regulasi :

- 1 Eliminasi Penyakit Kusta, Schistosomiasis dan Rabies
- 2 Restrukturisasi Pengelolaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Kerangka Regulasi :

- 1 RUU Sistem Pendidikan Nasional (mengintegrasikan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, Perubahan pasal terkait penyelenggaraan pendidikan dalam UU Pemda
- 2 Rancangan Inpres Wajib Belajar 13 tahun
- 3 Perpres Strategi Nasional Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
- 4 Perpres Ratifikasi Konvensi Global Rekognisi Kualifikasi Pendidikan Tinggi

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kerangka Regulasi :

- 1 Revisi UU Kependudukan (dengan penguatan pemanfaatan data Regsosek)
- 2 Sinkronisasi UU Kesejahteraan Sosial dan UU SJSN
- 3 Revisi Perpres 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan
- 4 Revisi Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 5 Revisi Undang-Undang No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kerangka Kelembagaan :

- 1 Inisiatif kelembagaan untuk pelayanan kesehatan di daerah sulit akses
- 2 Penguatan kelembagaan untuk pemberdayaan kader kesehatan

Kerangka Kelembagaan :

- 1 Lembaga Pusat Informasi Pendidikan Tinggi Indonesia (*National Information Center*)

Kerangka Kelembagaan :

- 1 Pembentukan Pokja Pendukung Regsosek dalam SDI
- 2 Sekretariat Regsosek

”

TRANSFORMASI EKONOMI



Isu Strategis Transformasi Ekonomi (1/5)



Industri

- 1 Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022)
- 2 Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022)
- 3 Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk *knowledge intensive* (Basri, 2023; , 2021)
- 4 Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh *unskilled labour* (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017)
- 5 Mismatched produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023)
- 6 Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara
- 7 Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022)



Pariwisata

- 1 Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- 2 Terbatasnya amenities, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- 3 Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- 4 Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- 5 Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal



Ekonomi Kreatif

- 1 Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
 - Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50 dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023)
 - Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor terendah dengan 2,5 skala 100
- 2 Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
- 3 Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- 4 Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- 5 Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah



Ekonomi Biru

- 1 Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan, PDB maritim hanya 7.6% pada tahun 2021
- 2 Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi, sehingga peringkat nilai OHI* Indonesia adalah 127 dari 221 negara
- 3 Prevalensi kemiskinan yang tinggi di masyarakat pesisir, dengan tingkat kemiskinan extreme 4.19% pada tahun 2021 (lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 4%)
- 4 Tuntutan pembangunan berkelanjutan, yang melihat kemajuan secara holistik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan

Isu Strategis Transformasi Ekonomi (2/5)



UMKM dan Koperasi

Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta

- 1 minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.



Ketenagakerjaan

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah

- 1 rata-rata negara kawasan ASEAN), menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.



Badan Usaha Milik Negara

1 Kinerja BUMN

- Masih rendahnya ROA BUMN (3,05% di tahun 2022)
- Masih rendahnya Kontribusi BUMN terhadap Pendapatan negara (Rp573,6 Triliun pada tahun 2022)

2 Daya Saing BUMN

- Jumlah BUMN Indonesia yang masuk peringkat global masih di bawah 10 BUMN
- Masih rendahnya Total Asset Turnover BUMN (0,3% pada tahun 2022)

3 Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan

- Masih rendahnya Rasio capex BUMN terhadap PDB (1,3% pada tahun 2022)
- Masih rendahnya rasio Jumlah TJSI BUMN yang disalurkan kepada masyarakat terhadap laba bersih BUMN (1,5% pada tahun 2022) /Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep Creating Shared Value (CSV)



Percepatan Transisi Energi

1 Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun

2 Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;

3 Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil

4 Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai

5 Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi

6 Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang

7 Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran

8 Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan

9 Ketergantungan pada produksi impor

10 Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga

11 Terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi

12 Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi)

Isu Strategis Transformasi Ekonomi (3/5)



Ekonomi Sirkular Industri

- 1 Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU (Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)) yang belum optimal
- 2 Rendahnya kapasitas pengolahan limbah elektronik (e-waste)
- 3 Rendahnya tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang
- 4 Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri
- 5 Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri masih terbatas
- 6 Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas
- 7 Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang
- 8 Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional kegiatan usaha pariwisata
- 9 Kurangnya fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik
- 10 Belum adanya standar pengelolaan limbah sisa konstruksi
- 11 Belum adanya rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi
- 12 Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk proses daur ulangnya
- 13 Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.



Tenaga Kerja Hijau

- 1 Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (*green jobs*)
- 2 Terbatasnya data dan informasi mengenai pasar kerja hijau
- 3 Belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau (*green jobs*)
- 4 Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau
- 5 Belum memadainya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)
- 6 Terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*) baik di tingkat nasional maupun daerah
- 7 Masih lemahnya peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau (*green jobs*)



Pengelolaan Hutan Lestari

- 1 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional masih rendah
- 2 Rendahnya Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
- 3 Belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan
- 4 Belum tuntasnya tata batas kawasan hutan
- 5 Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial belum mencapai kondisi ideal
- 6 Terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- 7 Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif
- 8 Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal

Isu Strategis Transformasi Ekonomi (4/5)



Digital

- 1 Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional
 - 78% ekonomi nasional terpusat di Jawa dan Sumatera (BPS, 2022).
 - Setiap 1% peningkatan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1996-2016, hanya mampu mendorong peningkatan PDB per kapita sebesar 1,4%, berbeda dengan China sebesar 3%. (World Bank, 2019).
- 2 Digitalisasi Sektor Strategis
 - Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet
 - Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI)
 - Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih *rendah (e-commerce)*
 - Inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*)
 - Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik dan industri berbasis teknologi
- 3 Aspek Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital
 - Keamanan siber nasional
 - Perlindungan data pribadi dan privasi
 - Literasi digital masyarakat belum merata
 - Penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai dan menerapkan adopsi teknologi
 - Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, *Blockchain*



Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- 1 Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas
 - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
 - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
 - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
 - Pembangunan wilayah tidak merata
 - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan
- 2 Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal

Supply Side:

 - Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa
 - Masih rendahnya awareness daerah untuk diversifikasi ekspor
 - Masih rendahnya daya saing ekspor domestik
 - Pembiayaan ekspor masih terhambat
 - Masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan
 - Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa
 - Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih
 - Standarisasi produk ekspor yang masih belum optimal
 - Masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha

Demand Side:

 - Daya saing produk sektor jasa yang masih rendah
 - Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global.
 - Adanya kebijakan dekarbonisasi (*decarbonization policies*) di beberapa negara
 - Peningkatan kebijakan proteksionisme serta *trade barriers* yang tinggi (*bea masuk, NTMs*) di beberapa negara.
- 3 Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global
 - Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas.
 - Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi.
 - Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi.
- 4 Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat
 - Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha
 - Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi
 - Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur.
 - Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi.

Isu Strategis Transformasi Ekonomi (5/5)



Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1 Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas

- Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa
- Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi
- Kinerja sistem logistik nasional belum optimal
- Pembangunan wilayah tidak merata
- Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan

2 Pemenuhan Layanan Perkotaan yang Belum Memadai dan Inklusif

- Hanya daerah perkotaan di 14 provinsi memiliki akses < 0,5 km terhadap shelter angkutan umum (BPS, 2022).
- RT perkotaan mendiami rumah layak huni hanya sebesar 63,45% dan dengan akses air minum sebesar 41,95% (BPS, 2022).

3 Tata Kelola yang Belum Terpadu, Inovatif, dan Kolaboratif

- Peran Pemerintah Provinsi dalam mendorong kerjasama pengelolaan Wilayah Metropolitan masih rendah (Pemkot Mataram, 2022).
- Dari 2000 RDTR pada 514 kab/kota, baru tercapai 357 RDTR, dengan 40 RDTR merupakan RDTR Kota Otonom (Kemen ATR/BPN, 2022)

4 Masalah Sosial-Ekonomi di Masyarakat Perkotaan

- Angka rasio gini perkotaan 0,409 d lebih tinggi dibandingkan perdesaan (BPS, 2022).
- Terdapat 47,62% proporsi lapangan kerja informal di perkotaan (BPS, 2022).
- Tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,29% (BPS, 2022).

5 Pola Pembangunan Perkotaan yang Menyerak

- Sumber utama urbanisasi adalah reklasifikasi desa menjadi kota sebesar 43% pada tahun 2000-2010 (World Bank, 2019).
- Pertumbuhan kawasan terbangun pinggiran kota berciri perdesaan sebesar 62,9% karena tumbuh industri dan aglomerasi penduduk baru (World Bank, 2019).

6 Degradasi Lingkungan Perkotaan dan Rendahnya Ketangguhan Bencana

- 75% Kawasan Perkotaan Indonesia berada di daerah pesisir, rentan banjir, dan kenaikan muka air (World Bank, 2021).
- Kecenderungan keberhasilan pengurangan risiko bencana lebih besar terjadi pada Kota Besar dibandingkan Kota Kecil (Bappenas, 2019)

Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi (1/4)



Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,74 (TWIII-2023)	21,9 - 23,0
12. Pengembangan Pariwisata		
a. Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	5,0
b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	6,7 (2022)	32
13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,54 (2022)	8,4
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	2,2
b. Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (2022)	3,9
c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	2,3
d. Return on Asset BUMN (%)	3,05 (2022)	3,9
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32 (2023)	4,0-5,0
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52 (2023)	60,9
17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB)	0,28 (2020)	0,45
b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	61 (2023)	50 besar



Highlight Intervensi

1. Penguatan industri dasar (kimia dasar dan logam dasar)
2. Hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
3. Pengembangan industri *medium-high technology* (elektronik dan digital, kimia hilir dan farmasi, alat angkut, serta kedirgantaraan)
4. Peningkatan produktivitas industri padat karya terampil (makanan-minuman, TPT, alas kaki)
5. Pengembangan Industrialisasi Perikanan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan
6. Penguatan Industri Manufaktur berbasis Kelautan -- Perkapalan dan Garam
7. Peningkatan Logistik dan Perdagangan Berbasis Biru Berkelanjutan
8. Pariwisata Bahari di Destinasi Pariwisata Prioritas
9. Pengembangan dan Pemanfaatan Penelitian, Inovasi, serta Peningkatan Kualitas SDM Biru
10. Penguatan Destinasi Regeneratif Bali, Batam-Bintan, dan Jakarta
11. Penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang
12. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat;
13. Pengembangan Kluster Pariwisata IKN
14. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (Pengembangan permintaan, pasokan, dan pemampu Ekonomi Kreatif)
15. Pengembangan koperasi sektor produksi dan fasilitasi kerja sama antar lembaga ekonomi di desa
16. Peningkatan kapasitas usaha melalui penerapan teknologi, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha
17. Peningkatan daya saing BUMN
18. Peningkatan kualitas peran BUMN sebagai agen pembangunan
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda, sosial, desa, dan inklusif.
20. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
21. Pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work
22. Penguatan pelayanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK)
23. Pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, dan modernisasi pertanian

Catatan : *Baseline* dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik

Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi (2/4)



Penerapan Ekonomi Hijau

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a. Indeks Ekonomi Hijau	a. 70,8	a. 77,2
b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	b. 12,3 (2022)	b. 23



Transformasi Digital

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)	51	44

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

- Percepatan Transisi Energi (termasuk KP Transportasi Hijau):
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur ketenagalistrikan
- Ekonomi Sirkular Industri:
 - Penguatan skema *Extended Producers/Stakeholders Responsibility* (EPR)
 - Penerapan standar *eco-desain* produk
 - Optimalisasi fasilitas pemulihan material
- Pengembangan SDM untuk mendukung Pekerjaan Hijau (*Green Jobs*)
- Pengelolaan Hutan Lestari
 - Peningkatan produktivitas hutan
 - Penguatan Pengelolaan hutan lestari



Highlight Intervensi

- Penuntasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK
- Penguatan SDM Digital
- Digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, termasuk diantaranya pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, industri, dst
- Penguatan keamanan siber
- Riset dalam rangka penguasaan teknologi
- Pengembangan *superplatform* digital

Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi (3/4)



Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
20. Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	12,5
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,1 (2022)	32,3
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	24,5 (2022)	26,7*

Keterangan: *masih merupakan hasil exercise awal

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

1. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
2. Peningkatan keterkaitan rantai pasok antar pusat pertumbuhan
3. Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
4. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi
5. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Logistik Nasional
6. Integrasi dan Digitalisasi Logistik
7. Pengembangan Fasilitas Logistik
8. Penguatan Pelaku Logistik
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia Logistik
10. Peningkatan investasi untuk mengembangkan industri prioritas, transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, ekonomi hijau, industri kreatif, pariwisata serta berorientasi riset dan teknologi
11. Peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global
12. Peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik
13. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antar daerah dan dengan global
14. Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi
15. Peningkatan ekspor produk berteknologi rendah/penyerap tenaga kerja tinggi
16. Peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA
17. Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif
18. Peningkatan ekspor produk UMKM dan integrasi UMKM dalam rantai nilai global
19. Peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *Electric Vehicle* (EV)
20. Peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global

Sasaran Pembangunan Transformasi Ekonomi (4/4)



Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34 (Proyeksi 2025)	45,58
b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau berkelanjutan (%)	63,15 (2023)	74

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

- Peningkatan kualitas **10 Wilayah Metropolitan** (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado), dengan beberapa intervensi utama berupa:
 - Peningkatan **cakupan layanan dan kualitas sarana dan prasarana** yang mendukung konektivitas infrastruktur **transportasi**, konektivitas **digital**, dan infrastruktur **konektivitas regional**;
 - Pengembangan **keterkaitan perdesaan (termasuk daerah transmigrasi)-perkotaan** dalam menghubungkan rantai nilai produksi (ekonomi), kerja sama antardesa (sosial), dan pengelolaan ruang kawasan (lingkungan); dan
 - Penguatan **koordinasi dan kerja sama antarwilayah** untuk pengelolaan WM, salah satunya melalui pembentukan **lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan** sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- Pembangunan **Ibu Kota Nusantara** dengan beberapa intervensi utama berupa:
 - Pengembangan **layanan kesehatan unggulan** yang dapat menjadi *center of excellence*
 - Peningkatan **kapasitas lembaga pendidikan eksisting** untuk menyiapkan tenaga terampil sesuai kebutuhan kluster ekonomi baru
 - Pemindahan **ASN, pegawai lembaga negara/badan publik**, serta **personel pertahanan dan keamanan** tahap 2
 - Pembangunan dan pengembangan lanjutan **infrastruktur dasar, utilitas**, hingga **transportasi** yang terintegrasi
 - Pembangunan awal (inisiasi) **kluster-kluster ekonomi prioritas**

Kebutuhan Kelembagaan Dan Regulasi Transformasi Ekonomi

Program Pembangunan	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Rencana Induk Industri Prioritas Nasional 2. Regulasi Peta Jalan Hilirisasi Industri Nasional 3. Regulasi Peta Jalan Dekarbonisasi Industri 4. Regulasi Peta Jalan Industri Baja Nasional 5. Revisi UU Perindustrian 6. Revisi PP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 7. Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor dengan Kebijakan Industri (kebijakan perdagangan, kebijakan energi, kebijakan tenaga kerja, kebijakan investasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Badan Karet Nasional
Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalisasi Indonesia Blue Economy Roadmap sebagai turunan dari amanat RPJPN 2025-2045 2. Penguatan regulasi <i>IUU Fishing</i> dan perikanan berbasis kuota 3. Legalisasi pengklasifikasian <i>Blue Taxonomy</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional 2. Regulasi Penerapan Pedoman Blue-Green-Circular Economy di Sektor Pariwisata 3. Regulasi Badan Otorita Pariwisata 4. RUU Kepariwisata pengganti UU 10/2009 5. Rancangan PP tentang RIPPARNAS pengganti PP 50/2011 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga otorita pelaksana pariwisata 2. Kelompok Kerja P3TB
Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual dan pengembangan ekonomi kreatif di tingkat provinsi 2. Regulasi skema insentif produksi film 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual 2. Kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat provinsi

Kebutuhan Kelembagaan Dan Regulasi Transformasi Ekonomi

IE dalam Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
IE 5 Penerapan Ekonomi Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan: 2. Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN). 3. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait <i>Extended Producers/Stakeholders Responsibility</i> 4. Rancangan Peraturan Menteri terkait standar eco-desain untuk produk sirkular 5. Revisi PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 6. Revisi PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko 7. Revisi PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 8. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang kebijakan pengaturan ekspor 9. Revisi PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 10. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 11. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup 12. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	
IE dalam Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
IE 6 Transformasi Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan kepada BUMN yang kompeten dalam infrastruktur dan layanan digital untuk membangun Superplatform Digital 2. Pembiayaan dan insentif pengembangan dan utilisasi Superplatform Digital 	Tata Kelola Super Platform Digital Indonesia

Kebutuhan Kelembagaan Dan Regulasi Transformasi Ekonomi

IE dalam Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
IE 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. RUU (konkret) RUU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	
IE dalam Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi	Kerangka Regulasi	Kerangka Kelembagaan
IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	RUU Perkotaan dan peraturan turunannya untuk: a) mendorong perubahan paradigma melalui keterpaduan perencanaan pembangunan perkotaan, b) penguatan tata kelola perkotaan lintas wilayah, dan c) sinergi sumber daya dan anggaran bersama.	Pembentukan Badan Pengelola Perkotaan/ Penguatan mekanisme kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Wilayah Metropolitan.

TRANSFORMASI TATA KELOLA



Isu Strategis Transformasi Tata Kelola



Integritas Partai Politik

- Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal)



Sistem Penggajian Tunggal

- Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif



Kualitas Regulasi

- Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal



Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

- Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas



Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

- Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.



Manajemen Talenta

- Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN)



Integrasi Proses Bisnis

- Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi

Sasaran Pembangunan Transformasi Tata Kelola



Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
24. Indeks Materi Hukum	0,25 (2021)	0,33
25. Indeks SPBE	2,34 (2022)	2,83
26. Indeks Pelayanan Publik	3,88 (2022)	4,13
27. Anti korupsi		
a. Indeks Integritas Nasional	a. 71,94 (2022)	a. 80,87
b. Indeks Perilaku Anti Korupsi	b. 3,92 (2023)	b. 4,19

Catatan: Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

1. Penguatan tata kelola regulasi dan pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi;
2. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
3. Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
4. Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
5. Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
6. Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan Penguatan Integritas Partai Politik.

Kebutuhan Kelembagaan dan Regulasi Transformasi Tata Kelola

Kebutuhan Kerangka Regulasi:

1. Revisi Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
2. Revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Revisi UU No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan:

1. Pembentukan pengembangan dan operasionalisasi Lembaga tunggal Pengelola Regulasi;
2. Penataan Kelembagaan Penerimaan Negara;
3. Pengintegrasian Kelembagaan Manajemen ASN;
4. Pengintegrasian Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran;
5. Pembentukan Kelembagaan yang mengatur peran dan fungsi operator pengelolaan sampah di Kota/Kabupaten.

SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA



Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia



Stabilitas Makro

- Risiko climate action; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga higher for longer; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS dan Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.



Politik Luar Negeri

- Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren global economic decoupling; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.



Keamanan

- Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.



Pertahanan

- Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.



Hukum

- Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.



Demokrasi

- Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

Sasaran Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia (1/2)



Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
28. Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,68
29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2021)	67,5
30. Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)	85,33



Highlight Intervensi

1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional
2. *Single prosecution system*, Budaya Hukum, Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap Keadilan, Penguatan Kelembagaan Hukum, Penerapan dan Penegakan Hukum
3. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme, Penguatan Keamanan Insani, Pelindungan WNI dan BHI, Keimigrasian dan Narkoba, Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi dan Penguatan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Keamanan Insani, Pelindungan WNI dan BHI, Keimigrasian dan Narkoba
4. Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan, Komunikasi Publik, Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi



Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0 (Perpres 75/2023)	12,0-14,0
32. Tingkat Inflasi (%)	2,86 (Nov' 23)	2,5 ± 1,0
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
a. Aset Perbankan / PDB (%)	a. 58,59	a. 84,4
b. Aset Dana Pensiun / PDB (%)	b. 7,6	b. 11,2
c. Aset Asuransi / PDB (%)	c. 7,36	c. 10,5
d. Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)	d. 48	d. 71,6
e. Total Kredit / PDB (%)	e. 35	e. 45,4
34. Inklusi Keuangan (%)	91	94




Highlight Intervensi

1. Reformasi perpajakan (pembenahan kelembagaan administrasi perpajakan)
2. Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
3. Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
4. Pengendalian inflasi diupayakan melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi Rupiah Bank Indonesia, pengelolaan subsidi harga energi Pemerintah tepat sasaran, penyelesaian masalah struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
5. Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan literasi serta inklusi keuangan
6. Peningkatan percepatan akses keuangan di daerah

Catatan : Baseline dan target masih bersifat indikasi teknokratik

Sasaran Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia (2/2)

 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	Indikator Pembangunan	
	Baseline	Target 2029
35. Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	60,4 (2023)	62,0-68,0
36. Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,6 (2023)	20

Catatan : *Baseline* dan target masih bersifat indikasi teknokratik



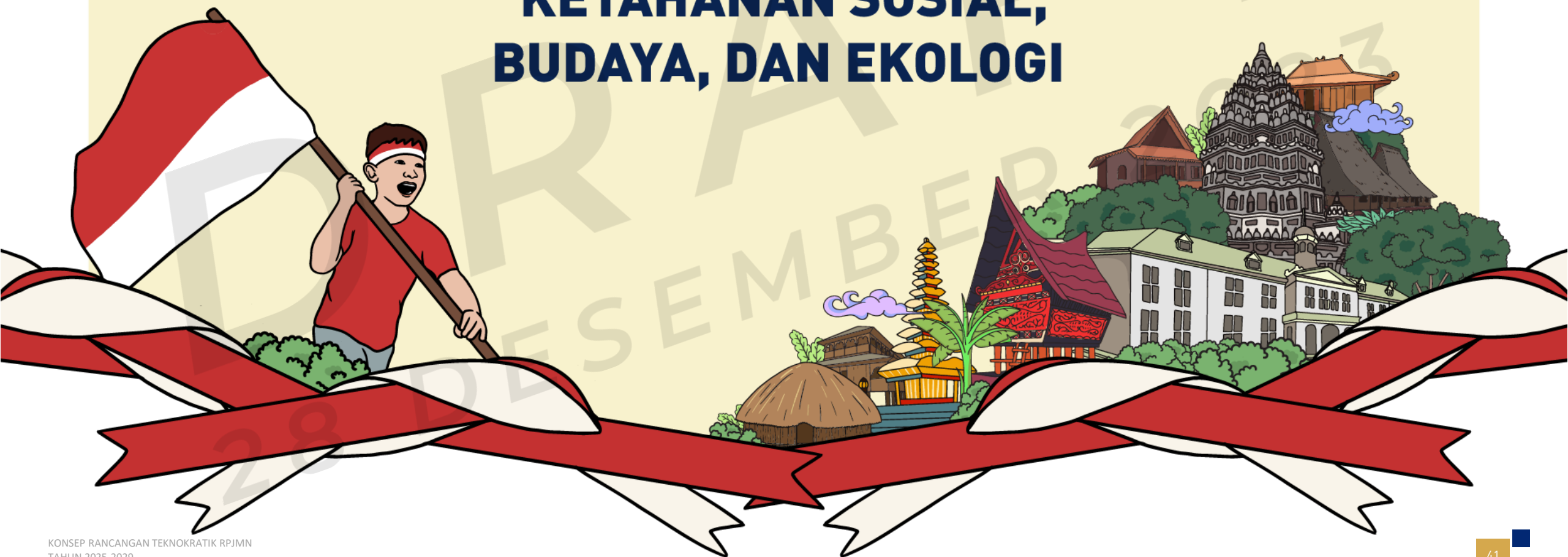
Highlight Intervensi

1. Intensifikasi perundingan dan kerja sama wilayah serta penguatan diplomasi kedaulatan; implementasi *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*; Penguatan posturing Kerja Sama Pembangunan Internasional (mencakup *integrated national financing framework*), pembangunan *data economic intelligence* berdaya guna berbasis TI; pengembangan dan implementasi desain besar diplomasi ekonomi, strategi *soft power Indonesia*, serta jejaring diaspora; serta Pemenuhan postur diplomasi penopang kebijakan luar negeri
2. Peningkatan kemampuan pertahanan dan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan

Kebutuhan Kelembagaan dan Regulasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Hukum	Keamanan	Demokrasi	Stabilitas Makro	Politik Luar Negeri	Pertahanan
<ul style="list-style-type: none"> Revisi UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Revisi UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara RUU tentang Hukum Acara Pidana Revisi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Revisi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak RUU yang mengatur terkait Ratifikasi Instrumen HAM Internasional RUU yang mengatur terkait Perlindungan Kelompok Rentan dan Perwujudan Kesenjangan bagi semua RUU terkait Perlindungan Pembela HAM RUU terkait Grasi RUU terkait Tata Cara Pelaksanaan Pidana RUU terkait Harmonisasi Ketentuan Perundang - Undang sesuai KUHP Revisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang RUU tentang Jaminan Benda Bergerak RUU tentang Badan Usaha Revisi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Pembentukan Dewan Keamanan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Rancangan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Revisi PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah Regulasi Badan Pengelola Administrasi Perpajakan Independen (Kemenkeu) Regulasi Macro-Development Council untuk penyalarsan MTF dan MTF (Bappenas, Kemenkeu) Regulasi Penguatan kelembagaan pengelola keuangan negara seperti negara maju (pemisahan fungsi treasury, revenue, dan planning-budgeting) Naskah Akademik Fiscal Rules Adaptif Regulasi Penguatan tata kelola Sovereign Wealth Fund terintegrasi untuk mencakup tujuan stabilisasi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Kelembagaan Spend To Invest untuk pengadaan Alutsista luar negeri

KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKOLOGI



Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi



Isu Agama

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02
- Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan



Isu Budaya

- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global
- Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13



Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
- Ketimpangan gender yang masih tinggi
- Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud



Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

- Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
- Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal;
- Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku
- Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.



Energi

- Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah
- Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil
- Efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik
- Kurangnya eksplorasi
- Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh BUMN energi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam permasalahan pengelolaan energi



Pangan

- Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan
- Peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi
- Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
- Tingginya fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antarwilayah
- Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan

Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (1/3)



Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,13 (2022)	59,23
38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02 (2023)	78,00



Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49* (2022)	64
40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,356

Catatan : Baseline dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

1. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
2. Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
3. Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
4. Pengembangan budaya literasi
5. Penguatan moderasi beragama
6. Transformasi penjaminan produk halal
7. Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
8. Transformasi layanan KUA yang berkualitas, merata dan inklusif



Highlight Intervensi

1. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
2. Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
3. Penguatan Institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak
4. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
5. Pengembangan masyarakat inklusif
6. Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan

Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (2/3)



Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,75
42. Kualitas Lingkungan Hidup		
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. 72,42(2022)	a. 75,02
b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	b. 12,5	b. 30,0
c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	c. 15 (13% terdaur ulang)	c. 38 (20% terdaur ulang)



Highlight Intervensi

1. Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
2. Sistem Peringatan Dini *Slow On Set* LH dan peningkatan Kesehatan laut
3. Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
4. Penurunan laju deforestasi
5. Penegakan Hukum Lingkungan
6. Pembangunan *Forest* dan *Sponge City* di Ibu Kota Nusantara
7. Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
8. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju *Circular Economy*



Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (1/2)

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a. Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi	a.6,64 (2022)	a. 6,95
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	b. 10,21 (BPS, 2022)	b. 8,46



Highlight Intervensi

1. Meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan (FEW Nexus)
2. Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi
3. Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, Pangan Lokal, Pangan Akuatik (*Blue Food*) dan Pangan Perkotaan)
4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, hewani, buah, sayur, serta biofortifikasi dan fortifikasi pangan
5. Penguatan tata kelola pangan (Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan, serta Pengembangan Satu Data Pangan)

Catatan : *Baseline* dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik

Sasaran Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi (3/3)



Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (2/2)

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
c. Ketahanan Air		
i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	i.58,34 (2022)	i. 70
ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	ii. 24 (2020)	ii. 51,36



Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indikator Pembangunan	Baseline	Target 2029
44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,135
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
a. Kumulatif	a. 28,12	a.31,49
b. Tahunan	b. 32,65	b.48,15

Catatan : *Baseline* dan Target masih bersifat indikasi Teknokratik



Highlight Intervensi

1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air (bendungan) dan pemulihan tampungan alami air (danau)
2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan
3. Pengelolaan risiko daya rusak air
4. Rehabilitasi hutan dan lahan
5. Penyediaan data dan informasi DAS yang berkualitas
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS
7. Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana



Highlight Intervensi

1. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pencegahan penyakit menular akibat iklim
3. Pertanian ramah iklim
4. Pembangunan dan konservasi sumber daya air
5. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
6. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
7. Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu.
8. Penguatan tata Kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana
9. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
10. Penyelarasan penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah

Kebutuhan Kelembagaan Dan Regulasi Ketahanan Sosial, Budaya Dan Ekologi

No	Judul Rancang Undang-Undang
1.	Revisi UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2.	Revisi UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3.	Revisi UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
4.	Revisi UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5.	Revisi UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
6.	Revisi UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
7.	Revisi UU Tentang Perlindungan Umat Beragama
8.	Revisi UU Tentang Masyarakat Hukum Adat
9.	Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional
10.	Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi; Sumber Air; dan Pengelolaan Sumber Daya Air
11.	Revisi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
12.	Revisi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
13.	Revisi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
14.	Revisi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

No	Judul Rancang Undang-Undang
15.	Revisi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Hutan
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Biosfer
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam KSDAHE
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
22.	Revisi Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan
23.	Revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
24.	Revisi Peraturan Presiden tentang Pengendalian Kerusakan DAS Bengawan Solo
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN)



Kementerian PPN/
Bappenas

04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA

■ KONSEP RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029

Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana (1/2)

Sasaran Visi 2045:
Kemiskinan Menuju 0%
dan Ketimpangan Berkurang

Target 2045
Kontribusi PDRB

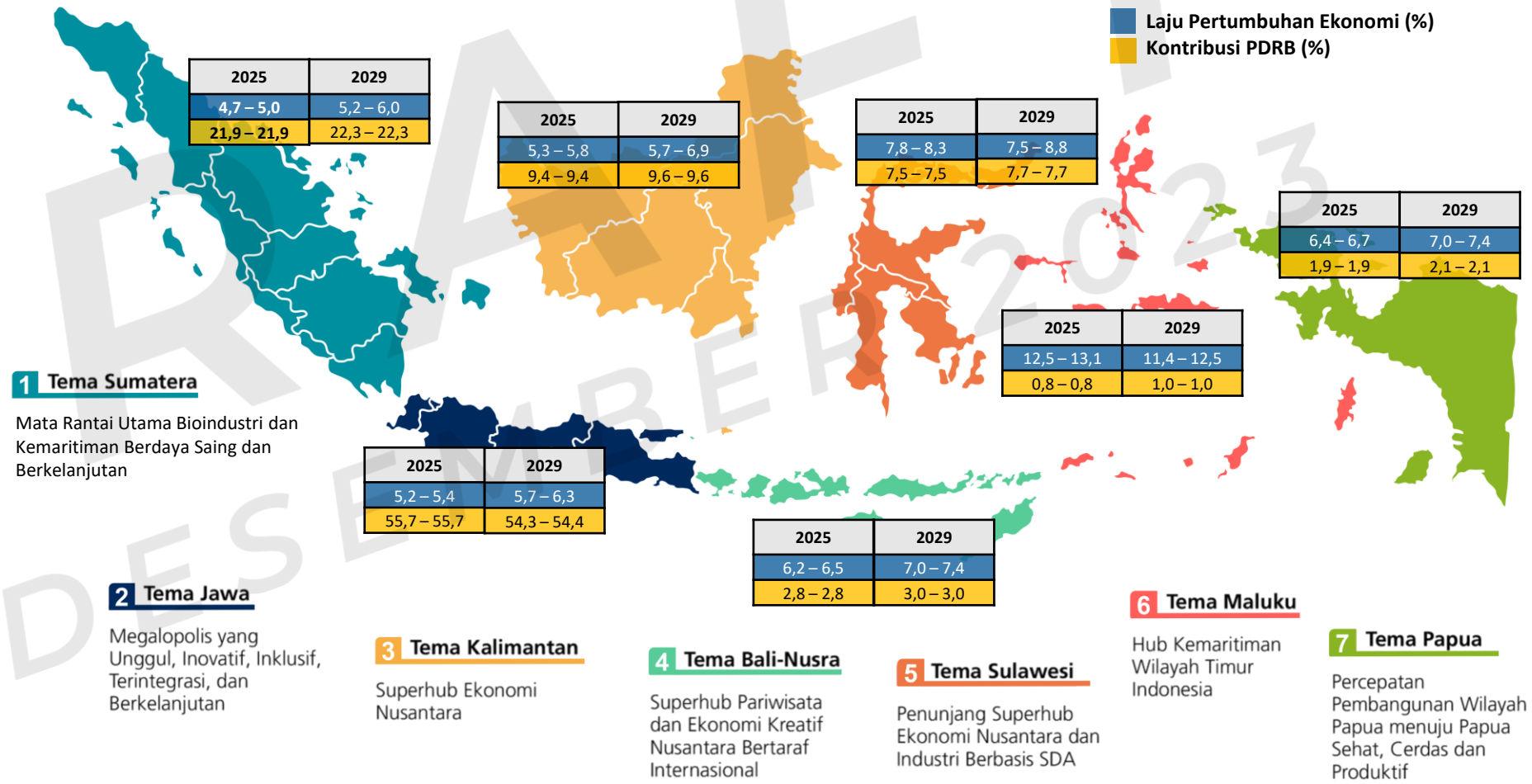
KBI: 71,5% KTI: 28,5%

Target Periode I RPJPN
(2025-2029) Kontribusi PDRB (%)

	2025	2029
KBI	77,6 – 77,6	76,6 – 76,7
KTI	22,4 – 22,4	23,3 – 23,4
IW	0,793	0,783
SI	46%*	51%*

IW: Indeks Williamson (Pertumbuhan 6%)
SI : Stok Infrastruktur terhadap PDB
*Perkiraan Sementara

Target Pertumbuhan dan Kontribusi Per Wilayah Pulau 2025-2029



1 Tema Sumatera

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan

2 Tema Jawa

Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

3 Tema Kalimantan

Superhub Ekonomi Nusantara

4 Tema Bali-Nusra

Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional

5 Tema Sulawesi

Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

6 Tema Maluku

Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia

7 Tema Papua

Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif

Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana (2/2)

PERSPEKTIF KEWILAYAHAN DAN SARANA PRASARANA

Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah

- Tata ruang
- Pertanian
- Informasi geospasial
- Mitigasi bencana
- SPM dan layanan dasar
- Desentralisasi dan otonomi daerah
- Tata kelola infrastruktur

Pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi

- Lambat tumbuh
- Kawasan perbatasan
- Kawasan transmigrasi
- Perdesaan

Pembangunan kluster ekonomi unggulan wilayah

- Aglomerasi perkotaan
- Pusat pertumbuhan
- Rantai nilai
- Kerja sama antardaerah
- Kolaborasi pentahelix

TEMA PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU

Peran provinsi dalam pencapaian jangka panjang wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dilaksanakan melalui:

TRANSFORMASI DAN LANDASAN TRANSFORMASI

Sosial

Ekonomi

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Tata Kelola

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia



Penguatan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah

Perumahan Permukiman

Transportasi

Pengairan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Energi dan Ketenagalistrikan

Highlight Intervensi Umum Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- **Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah** di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem OSS
- **Pengendalian pemanfaatan ruang** yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- **Percepatan reforma agraria, penuntasan sertifikasi tanah** menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan **percepatan pelayanan pertanahan modern** berbasis digital
- **Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris** dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)
- **Penguatan fondasi keuangan daerah** melalui intensifikasi PDRD dan peningkatan kualitas belanja, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- **Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian** layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- **Pemenuhan akses air minum dan sanitasi** yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim
- **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- **Pemenuhan kebutuhan listrik** melalui peningkatan pasokan listrik yang efisien dan rendah karbon
- **Penguatan infrastruktur digital**, peningkatan literasi dan kemampuan digital masyarakat, serta percepatan digitalisasi berbagai sektor

04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

Tema Pembangunan:

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman
Berdaya Saing dan Berkelanjutan.



Tema Pembangunan Pulau Sumatera:

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan



No	Provinsi	Tema
1	Aceh	Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau dan syariah, serta menjadi rujukan pendidikan Islam global
2	Sumatera Utara	Pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala keberagaman budaya yang harmonis
3	Sumatera Barat	Mandala pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia, yang bersendi kearifan budaya lokal
4	Riau	Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatera
5	Jambi	Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatera
6	Sumatera Selatan	Jantung ketahanan energi nasional yang mengedepankan pengembangan bioindustri, ekonomi hijau, dan ketahanan pangan
7	Bengkulu	Mandala pengembangan bioindustri dan ekonomi hijau
8	Lampung	Gerbang selatan Sumatera yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri
9	Kepulauan Bangka Belitung	Mandala pengembangan <i>quality tourism</i> dan ekonomi biru
10	Kepulauan Riau	Beranda maritim Indonesia bagian barat dan pusat ekonomi biru Sumatera

Provinsi Aceh (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau & syariah, serta menjadi rujukan pendidikan Islam global

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,1 – 1,1	4,1 – 4,3	10,78 – 11,28	0,290 – 0,293	4,74 – 5,45
2029	1,1 – 1,1	4,4 – 5,1	6,64 – 7,14	0,283 – 0,284	4,48 – 5,26

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting* pada Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kota Lhokseumawe, Kab. Pidie, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kab. Bireuen, Kota Sabang, Kota Langsa, Kab. Aceh Jaya;
- Peningkatan kualitas dan kinerja perguruan tinggi Islam di Aceh menuju bertaraf global (UIN Ar-Raniry dan IAIN Takengon), serta pengembangan perguruan tinggi di daerah afirmasi Kab. Simeulue;
- Peningkatan rumah sakit di Kota Lhokseumawe menjadi RS kelas B.

Ekonomi

- Pengembangan agroindustri terintegrasi di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh;
- Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Banda Aceh Kota, KPPN Weh, KPPN Takengon, KPPN Simeulue;
- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Sigli-Lhokseumawe-Medan;
- Pengembangan transportasi publik di Kws. Perkotaan Banda Aceh, Kws. Perkotaan Lhokseumawe, dan Kws. Perkotaan Meulaboh;
- Optimalisasi dan peningkatan layanan, sarana, dan prasarana kepelabuhanan di Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Meulaboh, dan Pelabuhan Lhokseumawe/Krueng Geukeuh;
- Peningkatan layanan penerbangan dari bandara *hub* utama ke Bandara Maimun Saleh (Sabang), Bandara Rembele (Redelong), Bandara Malikussaleh (Lhokseumawe), Bandara Lasikin (Sinabang), dan Bandara Cut Nyak Dhien (Meulaboh);
- Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis *hydropower* (PLTA Peusangan dan PLTA Kumbih);
- Pembangunan sistem transmisi listrik terintegrasi Sumatra 275 kV di wilayah Aceh.

Provinsi Aceh (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau & syariah, serta menjadi rujukan pendidikan Islam global

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,1 – 1,1	4,1 – 4,3	10,78 – 11,28	0,290 – 0,293	4,74 – 5,45
2029	1,1 – 1,1	4,4 – 5,1	6,64 – 7,14	0,283 – 0,284	4,48 – 5,26

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

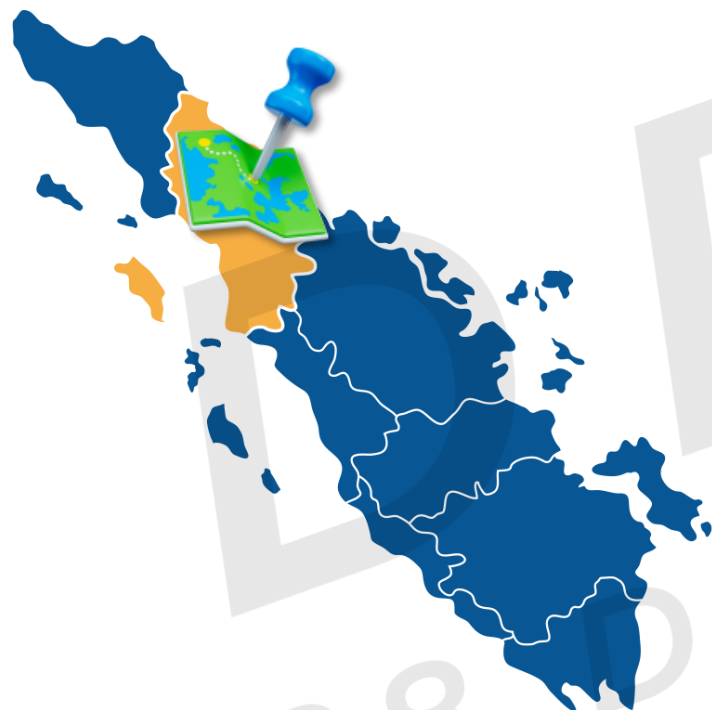
Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan DOB perkotaan baru: Kota Meulaboh; Pengaturan kembali dan penyempurnaan pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Lanal Sabang menjadi Lantamal Sabang sebagai garda barat maritim Indonesia Penguatan/peningkatan Lanal Simeulue; Pengendalian inflasi dengan prioritas pada Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Barat.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pertanian multikomoditas bernilai tinggi pada Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, Kab. Biruen, Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kab. Gayo Lues, Kab. Nagan Raya, Kab. Bener Meriah, Kab. Pidie Jaya, serta pengembangan irigasi di WS Tamiang-Langsa; Pembangunan dan konservasi sumber daya air pada DAS Krueng Aceh, DAS Peusangan, DAS Jambo Aye, DAS Krueng Meureubo, DAS Singkil, Danau Laut Tawar; Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis terutama pada Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tenggara; Peningkatan dan penyediaan layanan jaringan gas perkotaan pada Kws. Perkotaan Banda Aceh, Kws. Perkotaan Lhokseumawe, dan Kws. Perkotaan Meulaboh; Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya peninggalan sejarah Kesultanan Aceh (antara lain rekonstruksi Istana Kesultanan Aceh di Banda Aceh, serta konservasi Masjid Baiturrahman dan Taman Putroe Phang/Gunongan).

Provinsi Sumatera Utara (1/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 Pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala keberagaman budaya yang harmonis

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	5,0 – 5,0	5,1 – 5,4	5,66 – 6,16	0,303 – 0,307	4,92 – 5,64
2029	5,2 – 5,2	5,5 – 6,3	3,07 – 3,57	0,296 – 0,298	4,54 – 5,32

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri dan kepariwisataan (<i>pilot project</i>: Universitas Sumatra Utara); Peningkatan rumah sakit di Kota Gunungsitoli menjadi RS kelas B; Percepatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> pada Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Barat, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padangsidampuan, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Nias Selatan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Samosir, Kab. Nias, Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hilirisasi bioindustri pada Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai; Percepatan transisi kendaraan hijau di WM Medan dan Kws. Perkotaan Sibolga guna mengurangi emisi GRK; Pengembangan transportasi perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Medan; Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Nias Barat, KPPN Teluk Dalam, KPPN Medan Kota, KPPN Tangkahan–Leuser, KPPN Bukit Lawang, KPPN Toba, KPPN Sibolga Pembangunan jalan tol Trans Sumatra; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung; Pengembangan Aerocity Kualanamu dan layanan penerbangan di daerah 3TP; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro (PLTA Asahan) dan panasbumi serta interkoneksi Sistem Transmisi Sumatera 500 kV; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal.

Provinsi Sumatera Utara (2/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 Pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global, serta mandala keberagaman budaya yang harmonis

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	5,0 – 5,0	5,1 – 5,4	5,66 – 6,16	0,303 – 0,307	4,92 – 5,64
2029	5,2 – 5,2	5,5 – 6,3	3,07 – 3,57	0,296 – 0,298	4,54 – 5,32

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola; Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Utara yang profesional dan bebas korupsi; Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Medan.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Sumatera Utara menduduki peringkat pertama provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 36.534 kejadian).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pertanian di Kab. Serdang Bedagai, Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Nias, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Selatan, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Batu Bara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dengan pengembangan irigasi di WS Barumon-Kualuh, Wampu-Besitang, Nias, Belawan-Ular-Padang; Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi <i>hydropower</i> Sumatra Utara: 1.700 MW); Mitigasi bencana banjir secara struktural dan nonstruktural di Kota Medan .



Provinsi Sumatera Barat

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Mandala pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia, yang bersendi kearifan budaya lokal

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,5 – 1,5	5,3 – 5,5	3,35 – 3,85	0,274 – 0,279	4,94 – 5,65
2029	1,5 – 1,6	6,7 – 7,1	1,65 – 2,15	0,267 – 0,270	4,56 – 5,33

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Kep. Mentawai; Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi hijau, dan kepariwisataan (<i>pilot project</i>: Universitas Andalas).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan agroindustri terpadu di Padang; Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau-Mentawai; Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru-Padang; Pengembangan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Padang; Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas ruas Siak-Pekanbaru-Padang; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro (PLTA Masang) dan panas bumi (PLTP Muara Laboh) serta interkoneksi Sistem Transmisi Sumatera.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Padang.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah (termasuk di tingkat nagari); Pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan di kawasan afirmasi Kep. Mentawai, atau <i>government-induced activities</i> lainnya, guna meningkatkan basis permintaan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Sumatra Barat; Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi <i>hydropower</i> Sumatra Barat: 1.000 MW); Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.



Provinsi Riau

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatra

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	5,0 – 5,0	3,6 – 3,8	4,69 – 5,19	0,318 – 0,324	3,11 – 3,84
2029	4,8 – 4,8	3,9 – 4,5	2,50 – 3,00	0,311 – 0,312	2,85 – 3,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Kep. Meranti; Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri (<i>pilot project</i>: Universitas Riau).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kawasan strategis industri Medan-Dumai-Pekanbaru; Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Kisaran-Dumai, Pekanbaru-Padang, dan Pekanbaru-Jambi; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Dumai; Penyusunan kajian Pra-FS, FS, DED konektivitas langsung multiinfrastruktur Sumatra-Asia melalui Dumai, Pulau Rupat, dan Selat Malaka; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Riau yang profesional dan bebas korupsi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pangkalan militer komposit guna mengamankan <i>global maritime trade route</i> di Selat Malaka.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, termasuk pengamanan terhadap lahan gambut melalui pembangunan sistem irigasi rawa; Penguatan pertahanan dan keamanan perbatasan dan pulau terluar, terutama Pulau Batu Mandi, Pulau Rupat, Pulau Rangsang, dan Pulau Bengkalis.

Provinsi Jambi

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatra

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,4 – 1,4	4,8 – 5,2	5,28 – 5,78	0,337 – 0,341	2,37 – 3,10
2029	1,5 – 1,5	5,2 – 6,1	2,91 – 3,41	0,330 – 0,332	2,18 – 2,97

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri (<i>pilot project</i>: Universitas Jambi).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hilirisasi bioindustri dan hilirisasi batubara pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi; Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Palembang-Jambi dan Pekanbaru-Jambi; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro dan panas bumi (PLTA Merangin dan PLTP Sungai Penuh) dan interkoneksi Sumatera.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jambi yang profesional dan bebas korupsi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, termasuk pengamanan terhadap lahan gambut melalui pembangunan sistem irigasi rawa; Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi dari biomassa kelapa sawit); Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Merangin serta pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan air.



Provinsi Sumatera Selatan (1/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jantung ketahanan energi nasional yang mengedepankan pengembangan bioindustri, ekonomi hijau, dan ketahanan pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	3,1 – 3,1	5,3 – 5,6	8,87 – 9,37	0,332 – 0,336	3,67 – 4,39
2029	3,2 – 3,2	5,7 – 6,6	5,30 – 5,80	0,325 – 0,326	3,29 – 4,07

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan hilirisasi batubara, bioindustri, dan agrikultur (<i>pilot project</i>: Universitas Sriwijaya); Peningkatan rumah sakit di Kota Prabumulih menjadi RS kelas B; Percepatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> pada Kab. Musi Rawas, Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Lahat.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hilirisasi bioindustri dan hilirisasi batubara pada Kota Palembang, Kab. Banyuasin; Optimalisasi dan peningkatan layanan, sarana, dan prasarana Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II; Peningkatan layanan penerbangan dari bandara <i>hub</i> utama ke Bandara Silampari (Kota Lubuklinggau); Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Muara Enim – Lubuk Linggau, Sp, Indralaya – Muara Enim; Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Wilayah Metropolitan Palembang; Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis <i>hydropower</i> dan panas bumi (PLTP Lumut Balai); Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola di Wilayah Metropolitan Palembang; Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Sumatera Selatan (2/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jantung ketahanan energi nasional yang mengedepankan pengembangan bioindustri, ekonomi hijau, dan ketahanan pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	3,1 – 3,1	5,3 – 5,6	8,87 – 9,37	0,332 – 0,336	3,67 – 4,39
2029	3,2 – 3,2	5,7 – 6,6	5,30 – 5,80	0,325 – 0,326	3,29 – 4,07

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Palembang; Pengaturan khusus kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Kab. Musi Rawas Utara.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat pada objek vital, wilayah rentan, dan ranah siber.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pertanian multikomoditas bernilai tinggi pada Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas Utara serta pengembangan irigasi di WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau; Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang; Pembangunan dan konservasi sumber daya air pada DAS Musi, termasuk pembangunan Bendungan Sakagilas; Pemulihan lahan mangrove, gambut, dan ekosistem daratan pada Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kota Palembang, Kab. Pali (Penukal Abab Lematang Ilir), Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ilir; Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik.



Provinsi Bengkulu



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

Mandala pengembangan bioindustri dan ekonomi hijau

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,5 – 0,5	4,6 – 4,9	12,51 – 13,01	0,327 – 0,332	2,57 – 3,30
2029	0,5 – 0,5	5,3 – 6,2	8,24 – 8,74	0,320 – 0,321	2,38 – 3,17

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/ Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri dan ekonomi hijau (<i>pilot project</i>: Universitas Bengkulu).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hilirisasi bioindustri pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi; Lanjutan pembangunan tol Trans Sumatra ruas Prabumulih-Muaraenim-Bengkulu; Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas ruas Prabumulih-Bengkulu; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Pulaubaa; Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon, terutama pada kawasan hutan konservasi dan lindung di wilayah Bengkulu; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro dan panas bumi (PLTP Hululais).
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bengkulu yang profesional dan bebas korupsi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan di kawasan afirmasi Pulau Enggano, atau <i>government-induced activities</i> lainnya, guna meningkatkan basis permintaan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

Provinsi Lampung



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

Gerbang selatan Sumatra yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	2,2 – 2,2	5,0 – 5,4	8,74 – 9,24	0,318 – 0,321	3,30 – 4,03
2029	2,2 – 2,3	5,7 – 6,6	5,04 – 5,54	0,311 – 0,312	2,91 – 3,70

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur dan agroindustri (<i>pilot project</i>: Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatra); Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Pesisir Barat Lampung.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan agroindustri terintegrasi di Bandar Lampung; Kajian Pra-FS, FS, DED konektivitas langsung multiinfrastruktur Sumatra-Jawa melalui Selat Sunda; Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i>) yang menginterkoneksi pelabuhan-pelabuhan utama (<i>port-to-port interconnection</i>) di Sumatra pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis panas bumi dan hidro dan interkoneksi Sistem Jawa Sumatera.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Bandar Lampung.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Lampung menduduki peringkat keenam provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 9.764 kejadian).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Sumsel-Lampung dengan pengembangan irigasi di WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Seputih-Sekampung; Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

Provinsi Kep. Riau



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Beranda maritim Indonesia bagian barat dan pusat ekonomi biru Sumatra

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,6 – 1,6	5,2 – 5,6	3,10 – 3,60	0,334 – 0,338	5,84 – 6,55
2029	1,7 – 1,7	5,7 – 6,7	1,51 – 2,01	0,327 – 0,328	5,77 – 6,53

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan ekonomi biru dan perindustrian (<i>pilot project</i>: Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Politeknik Negeri Batam); Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Kep. Natuna-Anambas dan Kep. Lingga-Singkep.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan pelabuhan-pelabuhan di Batam, terutama Pelabuhan Batuampar; Pengembangan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, industri pengolahan sumber daya mineral, industri elektronik dan optik, industri mesin, industri galangan kapal, industri pertahanan dan keamanan, industri berbasis ICT, industri berbasis maritim dan <i>blue economy</i>); Pembangunan jembatan Batam-Bintan; Peningkatan layanan penerbangan antar pulau termasuk <i>seaplane</i> untuk mendukung pariwisata; Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Batam-Bintan, termasuk angkutan umum perkotaan; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi Kepulauan Riau serta sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>).
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Batam-Bintan.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pertahanan matra laut di Kawasan Strategis Industri Batam-Bintan; Pembangunan pangkalan militer komposit guna mengamankan <i>global maritime trade route</i> di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara (atau Laut Cina Selatan).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung di laut dan ekosistem alami; Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Busung dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air; Pengamanan pesisir pulau kecil terluar di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kep. Bangka Belitung



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

Mandala pengembangan *quality tourism* dan ekonomi biru

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,5 – 0,5	4,8 – 5,2	2,42 – 2,92	0,239-0,242	3,21-3,94
2029	0,5 – 0,5	5,4 – 6,1	1,04 – 1,54	0,232-0,233	2,83-3,61

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan kepariwisataan, ekonomi biru, dan pertambangan & industri logam berkelanjutan (<i>pilot project</i>: Universitas Bangka Belitung).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Belitung; Pengembangan ekonomi biru, terutama pada perikanan dan EBT berbasis kelautan; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Pangkal Balam; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Bandar Udara H. A. S. Hanandjoeddin; Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan Pangkalpinang; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi Sistem Sumatera - Bangka serta persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kep. Bangka Belitung yang profesional dan bebas korupsi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis dan peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA

Tema Pembangunan:

Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif,
Terintegrasi, dan Berkelanjutan.



Tema pembangunan Pulau Jawa:

Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan



No	Provinsi	Tema
1	DKI Jakarta	Kota global hijau yang menjadi simpul ekonomi Asia Tenggara
2	Jawa Barat	Pusat <i>cutting-edge industry</i> , inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional
3	Jawa Tengah	Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional
4	DI Yogyakarta	Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional
5	Jawa Timur	Mata-rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional
6	Banten	Penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional

Provinsi DKI Jakarta (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

Kota global hijau yang menjadi simpul ekonomi Asia Tenggara

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	16,3 – 16,3	5,1 – 5,3	1,39 – 1,89	0,425 – 0,430	5,29 – 6,00
2029	15,8 – 15,8	5,4 – 6,2	0,33 – 0,83	0,418 – 0,421	5,22 – 5,99

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global (<i>pilot project</i>: Universitas Indonesia); • Peningkatan rumah sakit di Kab. Kep. Seribu menjadi RS kelas C; • Percepatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> pada Kab Kep Seribu, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Tanjungpriok; • Pembangunan KA <i>Medium Speed</i> Jakarta – Surabaya (Tahap 1 Jakarta – Semarang); • Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Kep Seribu, KPPN Kota Tua–Sunda Kelapa, KPPN CBD Jakarta Kota, KPPN Cibubur–TMII; • Peningkatan layanan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke daerah afirmasi 3TP; • Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Jabodetabekmenuju taraf <i>global city</i> dan <i>economic hub</i> Asia Tenggara, antara lain <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan sistem transportasi massal publik berbasis jalan (BRT & feeder) dan rel (MRT & LRT); ○ <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>; ○ Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, melalui pengembangan public housing dan/atau <i>urban renewal</i> untuk mencapai kota tanpa permukiman kumuh; ○ Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; ○ Pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan SPKLU.

Provinsi DKI Jakarta (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

Kota global hijau yang menjadi simpul ekonomi Asia Tenggara

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	16,3 – 16,3	5,1 – 5,3	1,39 – 1,89	0,425 – 0,430	5,29 – 6,00
2029	15,8 – 15,8	5,4 – 6,2	0,33 – 0,83	0,418 – 0,421	5,22 – 5,99

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Jabodetabek.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Operasi dan patroli laut strategis di wilayah sekitar ALKI I; Penguatan/peningkatan Lantamal Jakarta; Penguatan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat pada objek vital, wilayah rentan, dan ranah siber.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan dan perlindungan pesisir dan laut di Kota Jakarta Utara; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di DAS Ciliwung dan DAS Krukut; Optimalisasi penanganan sampah domestik di hulu dan hilir, serta penerapan ekonomi sirkular; Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara di Metropolitan Jabodetabek; Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya peninggalan sejarah di KPPN Kota Tua–Sunda Kelapa; Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik.

Provinsi Jawa Barat (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	12,5 – 12,5	5,2 – 5,3	5,35 – 5,85	0,419 – 0,425	6,27 – 6,98
2029	12,1 – 12,1	5,7 – 6,1	3,11 – 3,61	0,412 – 0,413	6,24 – 6,99

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Jabar Selatan; • Percepatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> pada Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Majalengka, Kab. Karawang, Kota Sukabumi, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Purwakarta, Kota Banjar dan Kota Depok; • Peningkatan rumah sakit di Kota Depok menjadi RS kelas A; • Penguatan pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global (<i>pilot project</i>: Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban dan akses jalan tol & kereta api menuju Pelabuhan Patimban; • Pengembangan kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang & Kertajati-Cirebon (industri <i>hi-tech & cutting-edge industry</i>, industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik & optik, industri mesin, industri otomotif & alat angkutan, industri migas, industri pertahanan & keamanan, industri furnitur, industri aneka); • Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Cibadak-Palabuhanratu, Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang, Ciranjang-Padalarang, dan Gedebage-Garut-Tasikmalaya-Cilacap; • Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Bandung dan Metropolitan Jabodetabek; • Pembangunan KA Medium Speed Jakarta – Surabaya (Tahap 1 Jakarta – Semarang); • Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; • Pembangunan <i>pump storage</i> (Upper Cisokan); • Pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan SPKLU; • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola; • Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Jawa Barat (2/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	12,5 – 12,5	5,2 – 5,3	5,35 – 5,85	0,419 – 0,425	6,27 – 6,98
2029	12,1 – 12,1	5,7 – 6,1	3,11 – 3,61	0,412 – 0,413	6,24 – 6,99

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Bandung dan Metropolitan Jabodetabek.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy dengan pengembangan irigasi di WS Ciwulan-Cilaki; Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi <i>hydropower</i> Sumatra Utara: 1.200 MW); Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik; Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan <i>nature based solution</i> untuk mereduksi banjir di Kabupaten Cirebon; Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Cipanundaan, Cibeet, dan Cijurey serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Provinsi D.I. Yogyakarta (1/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,9 – 0,9	5,4 – 5,7	10,00 – 10,50	0,443 – 0,447	2,77 – 3,50
2029	0,8 – 0,9	6,0 – 6,9	6,36 – 6,86	0,436 – 0,438	2,76 – 3,54

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi

Highlight Arah Kebijakan

Sosial

- Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting* pada Kab. Gunungkidul;
- Penguatan pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global (*pilot project*: Universitas Gadjah Mada);
- Peningkatan rumah sakit di Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo menjadi RS kelas B.

Ekonomi

- Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Prambanan–Kalasan , KPPN Yogyakarta Kota, KPPN Pantai Selatan Yogyakarta, dan KPPN Merapi–Merbabu;
- Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
- Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Cilacap-NYIA, Bawen-Yogyakarta-NYIA, dan Kartasura-Yogyakarta;
- Pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan SPKLU di Kawasan Perkotaan Yogyakarta guna mengurangi emisi GRK;
- Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Yogyakarta, antara lain melalui pengembangan sistem transportasi publik massal terpadu dan melalui *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional

Provinsi D.I. Yogyakarta (2/2)

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,9 – 0,9	5,4 – 5,7	10,00 – 10,50	0,443 – 0,447	2,77 – 3,50
2029	0,8 – 0,9	6,0 – 6,9	6,36 – 6,86	0,436 – 0,438	2,76 – 3,54

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Yogyakarta.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali dan penyempurnaan pelaksanaan Otonomi Khusus Yogyakarta Pengendalian inflasi dengan prioritas di Kota Yogyakarta.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penanganan sampah domestik di hulu dan hilir, serta penerapan ekonomi sirkular; Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara di Kawasan Perkotaan Yogyakarta; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di kawasan afirmasi Pegunungan Sewu; Pelindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya pada KPPN Prambanan–Kalasan , KPPN Yogyakarta Kota; Pembangunan dan konservasi sumber daya air pada DAS Progo dan DAS Opak.

Provinsi Jawa Tengah (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	8,0 – 8,0	5,1 – 5,3	8,67 – 9,17	0,363 – 0,367	4,16 – 4,88
2029	7,8 – 7,9	5,9 – 6,5	5,46 – 5,96	0,356 – 0,358	3,78 – 4,55

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur dan perindustrian (<i>pilot project</i>: Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Jenderal Soedirman); Percepatan penuntasan dan pencegahan <i>stunting</i> pada Kab. Brebes, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Sragen, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar, Kab. Tegal, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo; Peningkatan rumah sakit di Kota Pekalongan menjadi rumah sakit kelas B.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Tanjungmas; Pengembangan kawasan strategis industri Pantura Jateng (industri kimia, industri logam & bahan galian, industri mesin, industri migas, industri aneka); Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta; Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Cilacap-NYIA, Bawen-Yogyakarta-NYIA, Kartasura-Yogyakarta, dan Tegal-Purwokerto-Cilacap; Pembangunan KA Medium Speed Jakarta – Surabaya (Tahap 1 Jakarta – Semarang); Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Semarang dan Metropolitan Surakarta; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; Pembangunan <i>pump storage</i> (Matenggeng); Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola; Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional

Provinsi Jawa Tengah (2/2)

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	8,0 – 8,0	5,1 – 5,3	8,67 – 9,17	0,363 – 0,367	4,16 – 4,88
2029	7,8 – 7,9	5,9 – 6,5	5,46 – 5,96	0,356 – 0,358	3,78 – 4,55

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Semarang dan Metropolitan Surakarta Pembentukan DOB baru: Kota Cilacap.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Jawa Tengah menduduki peringkat ketujuh provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 8.909 kejadian).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Dieng-Serayu, Jratunseluna, dan Bengawan Solo-Brantas; Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Tengah; Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik; Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kedunglanggar, Dolog, Bodri, Cabean, dan Karangnongko serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air; Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan <i>nature based solution</i> untuk mereduksi banjir di Kota Semarang, Demak-Grobogan-Kudus-Pati.

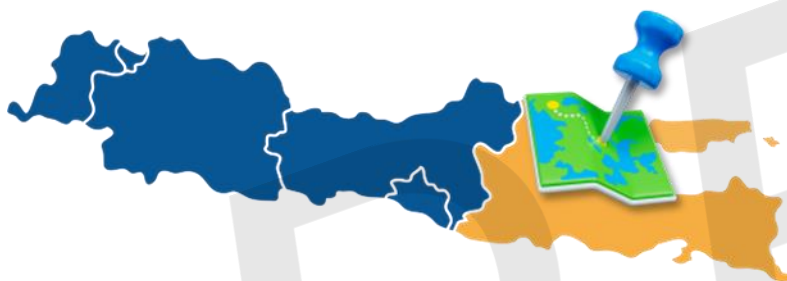
Provinsi Jawa Timur (1/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Mata-rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	14,2 – 14,2	5,2 – 5,5	7,58 – 8,08	0,381 – 0,386	3,65 – 4,38
2029	13,9 – 14,0	5,7 – 6,5	4,56 – 5,06	0,374 – 0,375	3,27 – 4,05

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi

Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Percepatan penurunan *stunting* terutama di Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek;
- Peningkatan rumah sakit Kota Malang menjadi rumah sakit kelas A;
- Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi biru, dan perindustrian (*pilot project*: Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Brawijaya);
- Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu dan Madura.

Ekonomi

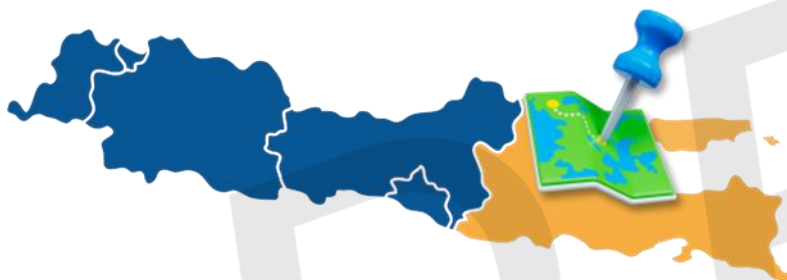
- Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Tanjungperak;
- Pengembangan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (*consumer goods*));
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang;
- Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi dan Surabaya-Lamongan;
- Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang;
- Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal;
- Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola;
- Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Jawa Timur (2/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Mata-rantai Penting Ketahanan Industri Nasional Dan Pusat Pengembangan Agrikultur, Agroindustri, Dan Ekonomi Biru Nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	14,2 – 14,2	5,2 – 5,5	7,58 – 8,08	0,381 – 0,386	3,65 – 4,38
2029	13,9 – 14,0	5,7 – 6,5	4,56 – 5,06	0,374 – 0,375	3,27 – 4,05

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang; Pembentukan DOB baru: Kota Jember.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Jawa Timur menduduki peringkat ketiga provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 19.257 kejadian).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Bengawan Solo-Brantas dan Tapal Kuda Jawa Timur; Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Timur.

Provinsi Banten

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	3,8 – 3,8	5,3 – 5,5	3,12 – 3,62	0,362 – 0,365	6,45 – 7,15
2029	3,7 – 3,8	5,8 – 6,3	1,67 – 2,17	0,355 – 0,357	6,41 – 7,17

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan perindustrian (<i>pilot project</i>: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa); Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Banten Selatan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Ciwandan/Pelabuhan Banten; Pengembangan kawasan strategis industri Cilegon-Serang-Tangerang (industri kimia, industri logam, industri mesin, industri elektronik, industri aneka (<i>consumer goods</i>)); Pengembangan Bandara Hub Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara; Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada Rangkasbitung-Panimbang; Reaktivasi layanan perkeretaapian pada ruas Rangkasbitung-Pandeglang (termasuk elektrifikasi dan jalur ganda); Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Jabodetabek; Kajian Pra-FS, FS, DED konektivitas langsung multiinfrastruktur Sumatra-Jawa melalui Selat Sunda; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola; Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Jabodetabek.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis agrikultur Banten Utara; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di Metropolitan Jabodetabek.



04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH BALI – NUSA TENGGARA

Tema Pembangunan:

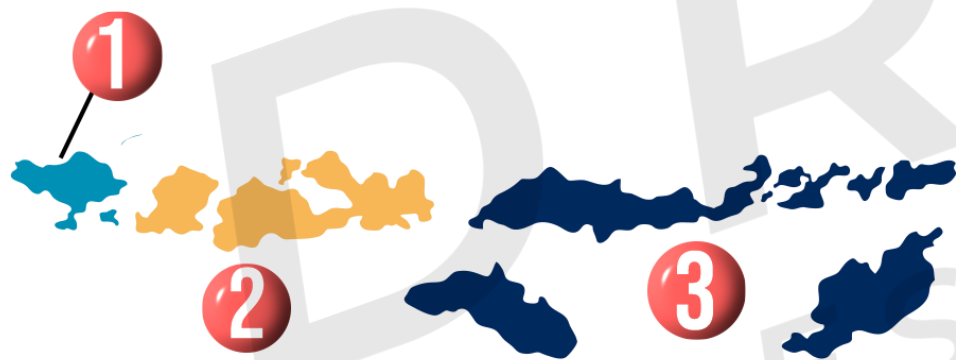
Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nusantara Bertaraf Internasional.



Tema Pembangunan Pulau Bali-Nusa Tenggara:

Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional

yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Timur Indonesia



No	Provinsi	Tema
1	Bali	Pusat Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Global
2	NTB	Pusat Pariwisata Petualangan dan Lumbung Pangan
3	NTT	Pusat Pariwisata Bahari dan Minat Khusus Bertaraf Internasional

Provinsi Bali (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI

Pusat Budaya, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Global

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,3 – 1,3	6,5 – 6,9	2,23 – 2,73	0,356 – 0,359	2,05 – 2,79
2029	1,4 – 1,4	7,6 – 8,0	1,04 – 1,54	0,349 – 0,351	1,85 – 2,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Penguatan pendidikan tinggi STEAM yang mendukung pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global (*pilot project*: Universitas Udayana);
- Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting* terutama pada Kab. Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan;
- Peningkatan kelas rumah sakit Kota Denpasar, Kota Singaraja, Kota Amplapura, Kota Semarapura dan Kota Negara menjadi rumah sakit kelas B.

Ekonomi

- Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Bali Utara-Singaraja dan sekitarnya, KPPN Menjangan - Pemuteran, KPPN Taman Nasional Bali Barat, KPPN Bedugul, KPPN Kawasan Kuta-Sanur-Nusa Dua, KPPN Nusa Penida, KPPN Ubud dan sekitarnya, KPPN Kintamani-Danau Batur, Besakih-Gunung Agung, KPPN Tulamben - Amed, KPPN Amuk;
- Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Bali, pada ruas Gilimanuk-Mengwi-Denpasar dan Denpasar-Gianyar-Bangli-Kintamani-Singaraja;
- Pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai *Maritime Tourism Hub*, termasuk pengembangan terminal *cruise* dan terminal barang (curah dan peti kemas);
- Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Metropolitan Sarbagita;
- Pengembangan kendaraan listrik dan pembangunan SPKLU di Metropolitan Sarbagita;
- Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Denpasar, antara lain melalui pengembangan sistem transportasi publik massal terpadu berbasis listrik dan melalui *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*;
- Penguatan tata kelola dan kelembagaan Metropolitan Denpasar;
- Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola.

Provinsi Bali (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI

Pusat Budaya, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Global

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,3 – 1,3	6,5 – 6,9	2,23 – 2,73	0,356 – 0,359	2,05 – 2,79
2029	1,4 – 1,4	7,6 – 8,0	1,04 – 1,54	0,349 – 0,351	1,85 – 2,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal dan pembangkit listrik tenaga surya termasuk PLTS Atap.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bali yang profesional dan bebas korupsi.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pertanian di Kab. Buleleng, Kabupaten, Jembrana, Kab. Klungkung, Kab, Badung, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem; Perlindungan pesisir dan konservasi lahan kritis di Bali; Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, terutama di pulau terluar Nusa Penida; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan 100 persen sampah terangkut serta tertangani di TPST sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkuler; Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Pusat Pariwisata Petualangan Dan Lumbung Pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,9 – 0,9	6,5 – 6,6	11,68 – 12,18	0,369 – 0,373	1,94 – 2,67
2029	0,9 – 0,9	6,8 – 7,3	7,37 – 7,87	0,362 – 0,364	1,85 – 2,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Pemenuhan tenaga kesehatan dan penanganan *stunting*, ISPA terutama di daerah afirmasi;
- Pengembangan SDM melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan pengadaan prodi perguruan tinggi STEAM sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan;
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat melalui sistem rujukan kepulauan dan penguatan *telemedicine*;
- Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan.

Ekonomi

- Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas melalui penguatan atraksi dan amenities;
- Pengembangan sentra-sentra berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan penopang kepariwisataan;
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Bali – NTB untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda;
- Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Nusa Tenggara untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya pengembangan Pelabuhan Lembar (NTB) serta Pelabuhan Bima (NTB) secara terpadu;
- Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Lombok) ;
- Pengembangan transmisi Sistem Sumbawa dan pembangkit listrik rendah karbon untuk meningkatkan keandalan.

Tata Kelola

- Penguatan kemandirian daerah berbasis perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata;
- Percepatan peningkatan SDM ASN berkualitas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Pusat Pariwisata Petualangan Dan Lumbung Pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,9 – 0,9	6,5 – 6,6	11,68 – 12,18	0,369 – 0,373	1,94 – 2,67
2029	0,9 – 0,9	6,8 – 7,3	7,37 – 7,87	0,362 – 0,364	1,85 – 2,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan penegakan regulasi, pertahanan keamanan, penguatan kolaborasi dan kerjasama antarpihak terutama dalam memberantas IUU <i>fishing</i> pada perairan di WPP 573, pengembangan pengelolaan lintas wilayah (<i>transboundary management</i>), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; • Penguatan diversifikasi pangan lokal (padi, jagung, dan sorgum); • Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari; • Penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan; • Integrasi pendekatan struktural dan non-struktural dengan menerapkan <i>nature based solution</i> untuk mereduksi banjir di Kota Bima; • Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Krekeh, Mujur dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Tema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Pusat Pariwisata Bahari Dan Minat Khusus Bertaraf Internasional

Provinsi Nusa Tenggara Timur (1/2)

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,6 – 0,6	5,3 – 5,5	15,32 – 15,82	0,319 – 0,324	2,24 – 2,97
2029	0,6 – 0,6	5,9 – 6,3	9,75 – 10,25	0,312 – 0,315	2,11 – 2,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Penanganan *stunting* dan penyakit endemik (malaria), terutama di daerah afirmasi;
- Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan, termasuk peningkatan pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan), *telemedicine*, serta sistem *sister hospital* dengan RS di wilayah lain terutama di daerah afirmasi;
- Pengembangan SDM melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi serta penyiapan prodi perguruan tinggi STEAM sesuai kebutuhan di bidang pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif;
- Pemenuhan akses air minum aman dan layak serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Ekonomi

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif; pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan, dan sentra-sentra pemasaran di kawasan perkotaan, terutama dengan memanfaatkan kedekatan dengan Australia dan Selandia Baru;
- Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo melalui penguatan atraksi dan amenitas untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan serta pemecah konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan, serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai penopang kepariwisataan dan upaya diversifikasi ekonomi;
- Pengembangan *tourism hub* dengan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama multi pihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional;
- Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) serta pelabuhan lainnya seperti Labuan Bajo (NTT) secara terpadu;
- Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane* di Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP;
- Pengembangan listrik terbarukan berbasis surya, panas bumi dan hidrogen dan penguatan transmisi Sistem Timor, Sistem Flores dan Sistem Sumba, serta sistem terisolasi (*isolated grid*).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (2/2)

Tema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pusat Pariwisata Bahari Dan Minat Khusus Bertaraf Internasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,6 – 0,6	5,3 – 5,5	15,32 – 15,82	0,319 – 0,324	2,24 – 2,97
2029	0,6 – 0,6	5,9 – 6,3	9,75 – 10,25	0,312 – 0,315	2,11 – 2,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kerjasama antar daerah dengan mengoptimalkan kembali kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya dengan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; • Penguatan skema kerjasama dengan negara-negara tetangga antara lain Timor Leste, Australia, dan New Zealand untuk memperluas pasar internasional.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan; • Penegakan regulasi dan pertahanan keamanan untuk mewujudkan kedaulatan di laut yang mencakup keamanan dan pelestarian sumber daya kelautan, penyiapan kolaborasi dan kerjasama antarpihak terutama dalam memberantas IUU Fishing pada perbatasan perairan di WPP 573 dan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (transboundary management).
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelestarian adat, tradisi, lingkungan, dan budaya lokal sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal; • Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/ <i>food estate</i> termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal; • Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Mbay dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.



04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Tema Pembangunan:

Superhub Ekonomi Nusantara.



Tema Pembangunan Pulau Kalimantan Superhub Ekonomi Nusantara

Pusat Aglomerasi dan Pengembangan Ekonomi Baru Berbasis Kluster Ekonomi Masa Depan Untuk Mendorong Terciptanya Pemerataan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia



No	Provinsi	Tema
1	Kalimantan Barat	Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah
2	Kalimantan Tengah	Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional
3	Kalimantan Selatan	Gerbang Logistik Kalimantan
4	Kalimantan Timur	Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia
5	Kalimantan Utara	Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan
6	Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	Kota Dunia Untuk Semua

Provinsi Kalimantan Tengah (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,1 – 1,1	6,2 – 6,5	3,18 – 3,68	0,311 – 0,315	3,26 – 3,99
2029	1,1 -- 1,2	6,6 – 7,6	1,68 – 2,18	0,304 – 0,306	2,87 – 3,66

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan Kebijakan/Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi malaria dan penyakit tropis terabaikan; 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendukung potensi lokal.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat industri khususnya dengan hilirisasi komoditas unggulan daerah (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan; 2. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk <i>food estate</i> untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani; 3. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan seperti pengembangan <i>eco-tourism</i> berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau dengan pelibatan mitra lokal; 4. Lanjutan Pembangunan Bandara Baru Murung Raya; 5. Lanjutan pembangunan Jalan Trans Kalimantan Penghubung Kaltim – Kalteng; 6. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan sungai perintis; 7. Pembangunan pembangkit terbarukan berbasis surya pada daerah <i>isolated</i> berbeban rendah.

Provinsi Kalimantan Tengah (2/2)



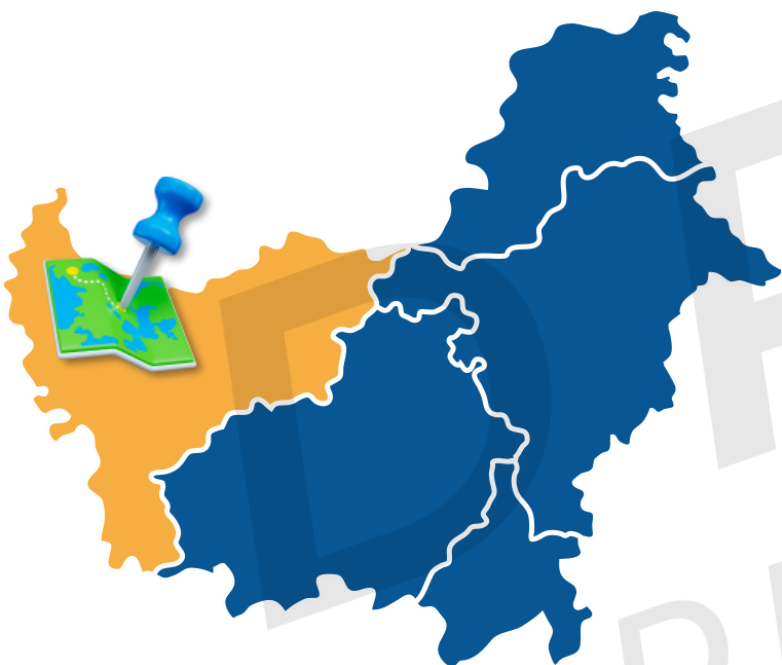
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,1 – 1,1	6,2 – 6,5	3,18 – 3,68	0,311 – 0,315	3,26 – 3,99
2029	1,1 – 1,2	6,6 – 7,6	1,68 – 2,18	0,304 – 0,306	2,87 – 3,66

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan	Kebijakan/Indikasi Intervensi
Tata Kelola	1. Penguatan kerja sama Kalimantan Tengah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di Wilayah Kalimantan;	2. Peningkatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah khususnya Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) serta pemanfaatan pembiayaan alternatif;	2. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	1. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Palangkaraya;	2. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
	3. Pengembangan irigasi di WS Barito, Mentaya-Katingan untuk mendukung lumbung pangan nasional.	

Provinsi Kalimantan Barat



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,4 – 1,4	5,5 – 5,7	4,80 – 5,30	0,315 – 0,321	3,91 – 4,63
2029	1,4 – 1,4	5,8 – 6,7	2,90 – 3,40	0,308 – 0,311	3,52 – 4,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/indikasi intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh Wilayah terutama Kalimantan Barat melalui perlindungan sosial adaptif; 2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri; 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Barat (kelapa sawit, bauksit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan; 3. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Barat seperti Pelabuhan Kijing yang dikembangkan secara terpadu untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi; 4. Pengembangan Bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah di Kota Pontianak sebagai Bandara Utama (Bandara Supadio); 5. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis surya dan persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta transmisi Sistem Kalbar.
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems (OBP)</i> di Kalimantan Barat; 2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan diversifikasi pangan; 2. Rehabilitasi hutan dan pemanfaatan lahan pasca tambang serta penghambatan laju deforestasi; 3. Pengembangan irigasi di WS Kapuas dan Sambas guna mendukung pengembangan pangan lokal; 4. Pengembangan pangan akuatik di Kalimantan Barat; 5. Peningkatan dan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar, perumahan, sanitasi dan air minum layak serta persampahan.

Provinsi Kalimantan Selatan (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Gerbang Logistik Kalimantan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,3 – 1,3	4,6 – 5,4	2,52 – 3,02	0,307 – 0,311	3,61 – 4,33
2029	1,3 – 1,3	5,3 – 6,7	1,29 – 1,79	0,300 – 0,302	3,22 – 4,01

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi

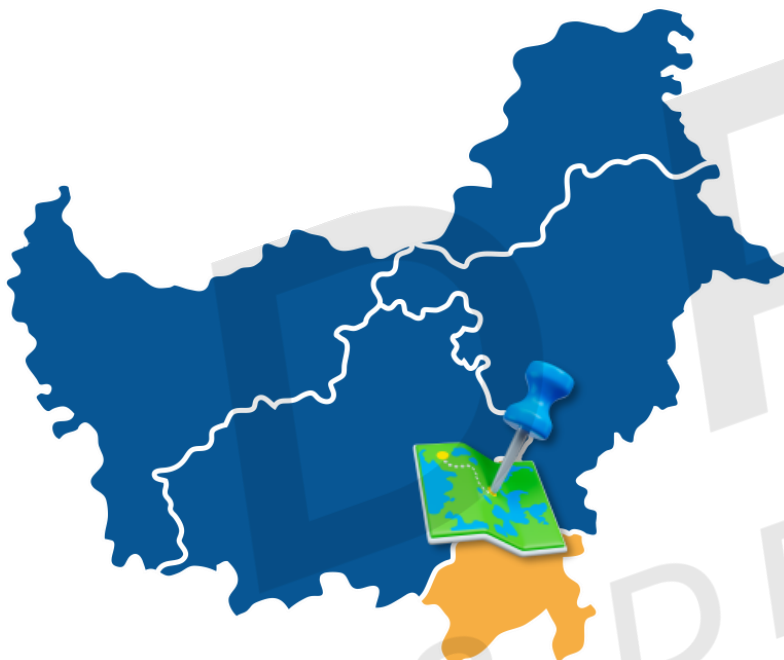
Sosial

1. Penuntasan *stunting* dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi;
2. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.

Ekonomi

1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan;
2. Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global *geopark*) di **Geopark Geosite Meratus** dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
3. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk **Wilayah Metropolitan Banjarbakula**, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
4. Pengembangan bandara utama (**Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin**) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk *aerocity*);
5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin;
6. Penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam dan persiapan interkoneksi transmisi Jawa-Kalimantan;
7. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola;
8. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Kalimantan Selatan (2/2)



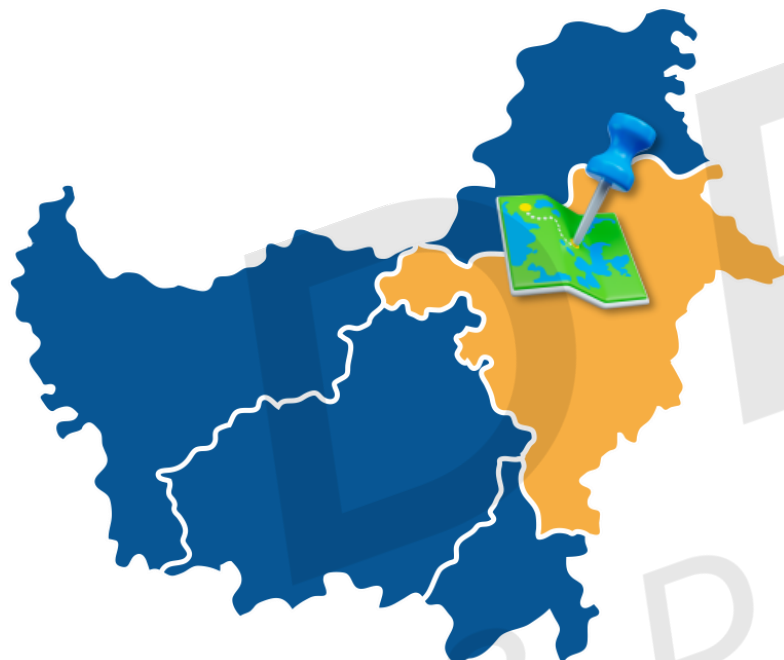
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Gerbang Logistik Kalimantan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	1,3 – 1,3	4,6 – 5,4	2,52 – 3,02	0,307 – 0,311	3,61 – 4,33
2029	1,3 – 1,3	5,3 – 6,7	1,29 – 1,79	0,300 – 0,302	3,22 – 4,01

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi; 2. Pengembangan irigasi di WS Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan; 3. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kusan, Riam Kiwa dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air; 4. Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestic; 5. Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan <i>nature based solution</i> untuk mereduksi banjir di Kota Banjarmasin.

Provinsi Kalimantan Timur (1/2)



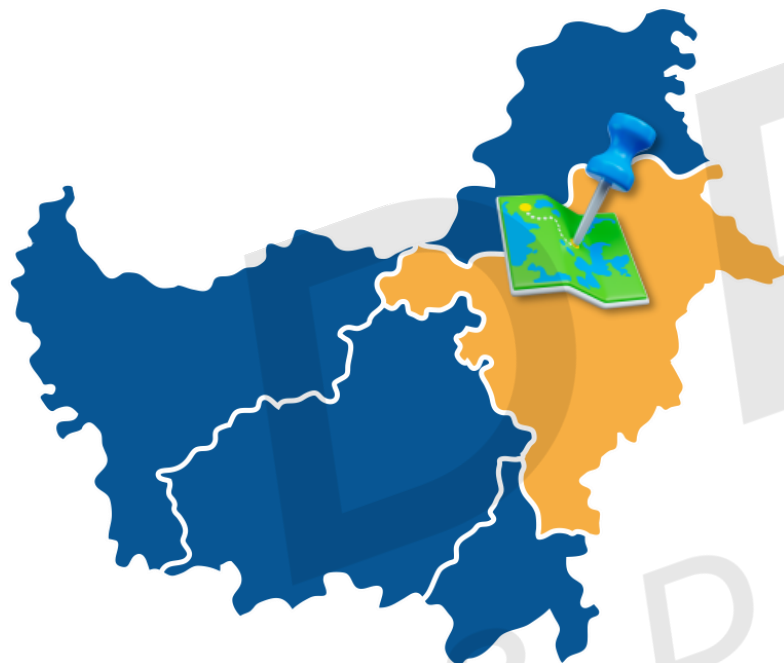
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	4,9 – 4,9	5,1 – 5,8	2,98 – 3,48	0,316 – 0,321	4,73 – 5,45
2029	5,0 – 5,0	5,6 – 6,9	1,62 – 2,12	0,309 – 0,312	4,54 – 5,31

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi; 2. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya; 3. Percepatan peningkatan partisipasi pendidik dan pengembangan perguruan tinggi eksisting yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri <i>oleochemicals</i>, <i>petrochemicals</i>, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi; 2. Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan; 3. Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang di Balikpapan) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah; 4. Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan Timur; 5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Samarinda dan Balikpapan; 6. Pengembangan pembangkit listrik hidro, sistem penyimpanan energi, interkoneksi Sistem Kalimantan 150 kV serta sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>).

Provinsi Kalimantan Timur (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	4,9 – 4,9	5,1 – 5,8	2,98 – 3,48	0,316 – 0,321	4,73 – 5,45
2029	5,0 – 5,0	5,6 – 6,9	1,62 – 2,12	0,309 – 0,312	4,54 – 5,31

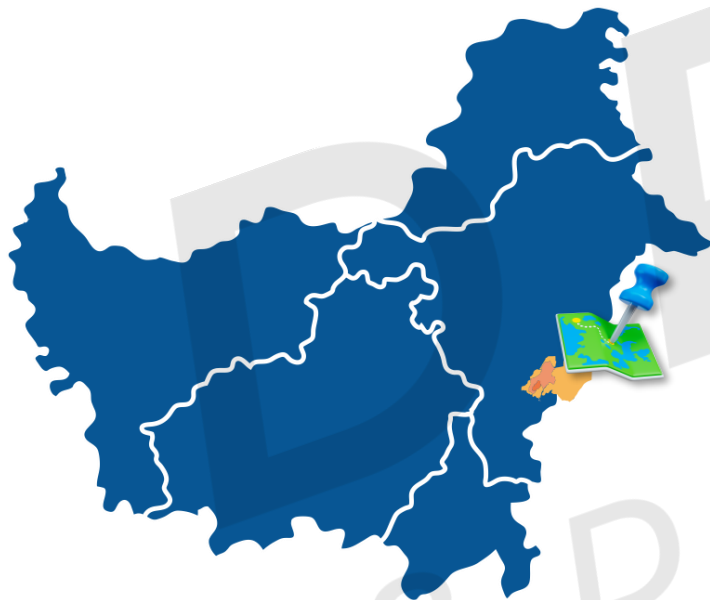
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon; 2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat; 2. Pengembangan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal; 3. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan; 4. Pengembangan irigasi di WS Mahakam untuk mendukung ketahanan pangan; 5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA Kota Dunia untuk Semua

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelayanan kesehatan berstandar internasional di wilayah Ibu Kota Nusantara; 2. Pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai kluster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global; 3. Pembentukan <i>Center of Excellence</i> di Ibu Kota Nusantara.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan yang didorong berbagai pengembangan awal inovasi dan riset; 2. Pengembangan awal ekowisata dan <i>meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism (MICE tourism)</i> di Ibu Kota Nusantara, termasuk pengembangan <i>economic dan financial centre</i>; 3. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara untuk mendukung konektivitas 3 kota (IKN – Balikpapan – Samarinda); 4. Penyediaan tenaga listrik hidro dan surya serta sistem penyimpanan energi yang hijau, cerdas, berkelanjutan, dan terinterkoneksi.
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> dengan transformasi cara kerja baru yang didukung oleh penataan manajemen ASN di Ibu Kota Nusantara; 2. Pengembangan <i>smart city</i> untuk mendorong tata Kelola perkotaan yang cerdas.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi pendekatan struktural dan non struktural dengan menerapkan konsep <i>sponge city (nature based solution)</i> untuk mereduksi banjir di Ibu Kota Nusantara; 2. Peningkatan peluang partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Timur dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara; 3. Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik.



Provinsi Kalimantan Utara (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,7 – 0,7	5,6 – 5,9	2,50 – 3,00	0,271 – 0,274	2,90 – 3,63
2029	0,7 – 0,7	6,2 – 6,9	1,37 – 1,87	0,264 – 0,266	2,72 – 3,50

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi; 2. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan melalui afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal, terutama di daerah afirmasi 3TP; 3. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (batu bara dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri <i>petrochemicals</i> dan industri kendaraan Listrik; 2. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning; 3. Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan (<i>hydropower</i> dan solar panel); 4. Pengembangan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; 5. Pengembangan kawasan industri (seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia Tanah Kuning) dengan memanfaatkan potensi energi lokal seperti hidro (Sungai Kayan) dan gas bumi; 6. Pengembangan pembangkit listrik berbasis hidro (PLTA Kayan dan Mentarang) beserta transmisi Sistem Kaltara 150 kV serta sistem terisolasi; 7. Pengembangan pembangkit rendah karbon untuk industri (<i>captive power</i>).

Provinsi Kalimantan Utara (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,7 – 0,7	5,6 – 5,9	2,50 – 3,00	0,271 – 0,274	2,90 – 3,63
2029	0,7 – 0,7	6,2 – 6,9	1,37 – 1,87	0,264 – 0,266	2,72 – 3,50

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan <i>Outstanding Boundary Problems</i> (OBP) di Kalimantan Utara; 2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan diversifikasi pangan; 2. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau, terutama di sepanjang pesisir daratan Kalimantan Utara; 3. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kayan dan Mentarang untuk mendukung lumbung energi baru; 4. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah 5. Pengamanan pesisir pulau kecil terluar.

04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

Tema Pembangunan:

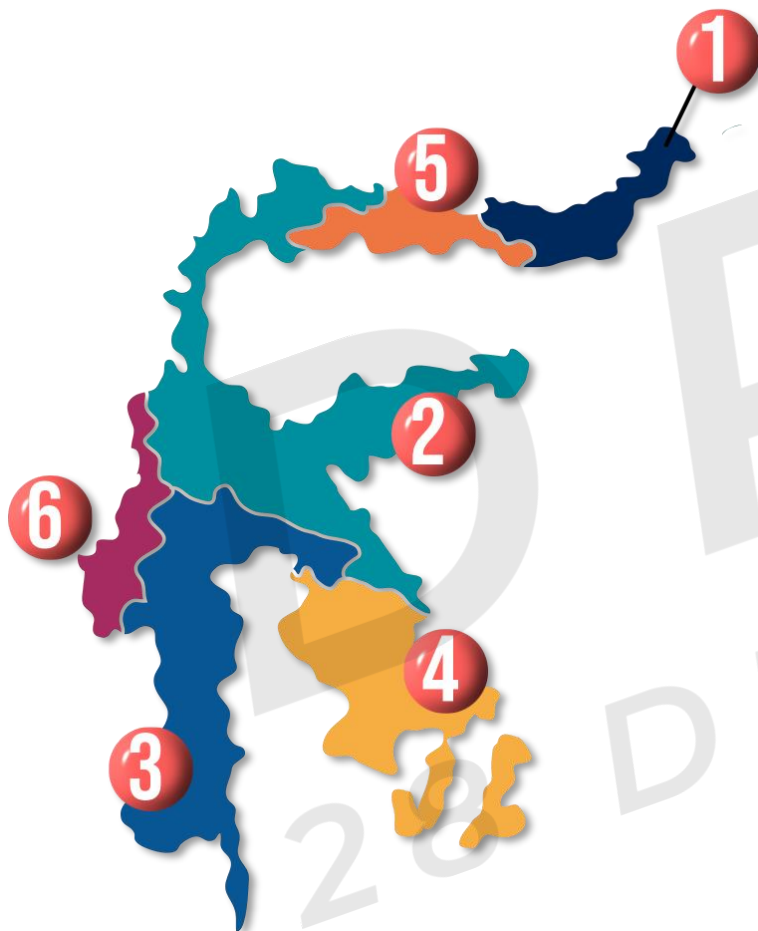
Penunjang Superhub Ekonomi
Nusantara dan Industri Berbasis SDA.



Tema Pembangunan Pulau Sulawesi

Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.



No	Provinsi	Tema
1	Sulawesi Utara	Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata
2	Sulawesi Tengah	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan
3	Sulawesi Selatan	Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan
4	Sulawesi Tenggara	Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari
5	Gorontalo	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Sulawesi Barat	Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan

Provinsi Sulawesi Utara (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,8 – 0,8	4,9 – 5,9	4,30 – 4,80	0,364 – 0,367	4,86 – 5,57
2029	0,8 – 0,8	5,4 – 7,1	2,55 – 3,05	0,357 – 0,358	4,69 – 5,46

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

1. Perkuatan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis dan kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses dan afirmasi;
2. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan vokasi melalui percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, pengadaan prodi STEAM, pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan pengembangan sektor unggulan serta ketertarikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
3. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Ekonomi

1. Optimalisasi KEK Bitung dalam peningkatan nilai tambah perikanan yang didukung dengan ekspor komoditas unggulan di Sulawesi Utara;
2. Peningkatan nilai tambah pariwisata yang berkelanjutan mendukung pengembangan DPP Manado-Likupang;
3. Penguatan konektivitas infrastruktur transportasi dan digital yang menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Utara;
4. Pengembangan kawasan perkotaan dan WM Manado yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
5. Penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi dan adopsi digital seluruh wilayah dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan;
6. Pengembangan jaringan listrik terisolasi (*isolated grid*) kepulauan;
7. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola;
8. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Sulawesi Utara (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,8 – 0,8	4,9 – 5,9	4,30 – 4,80	0,364 – 0,367	4,86 – 5,57
2029	0,8 – 0,8	5,4 – 7,1	2,55 – 3,05	0,357 – 0,358	4,69 – 5,46

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Tata Kelola

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan *smart government*, dan peningkatan kapasitas aparatur;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal;
2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

1. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti rumah layak huni, air minum dan sanitasi aman, pengelolaan persampahan;
2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
3. Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan *nature based solution* untuk mereduksi banjir di Kota Manado;
4. Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik;
5. Pengamanan pesisir pulau kecil terluar.

Provinsi Sulawesi Tengah (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	2,1 – 2,1	13,3 – 13,8	9,04 – 9,54	0,298 – 0,302	2,19 – 2,93
2029	2,4 – 2,4	9,7 – 11,0	5,45 – 5,95	0,291 – 0,293	2,06 – 2,86

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

1. Percepatan penanganan *stunting* dan percepatan eliminasi penyakit menular endemis seperti sistosomiasis;
2. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta penguatan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;
3. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
4. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan daerah afirmasi.

Ekonomi

1. Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral yang berkelanjutan;
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan dan perkebunan;
3. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi seperti Pelabuhan Pantoloan (Sulawesi Tengah) sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia;
4. Pengembangan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Djufri dan integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas;
5. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Industri (KI) Morowali yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
6. Pengembangan interkoneksi transmisi Sistem Sulawesi 150 kV.

Provinsi Sulawesi Tengah (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	2,1 – 2,1	13,3 – 13,8	9,04 – 9,54	0,298 – 0,302	2,19 – 2,93
2029	2,4 – 2,4	9,7 – 11,0	5,45 – 5,95	0,291 – 0,293	2,06 – 2,86

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Tata Kelola

1. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan *smart government*, dan peningkatan kapasitas aparatur.

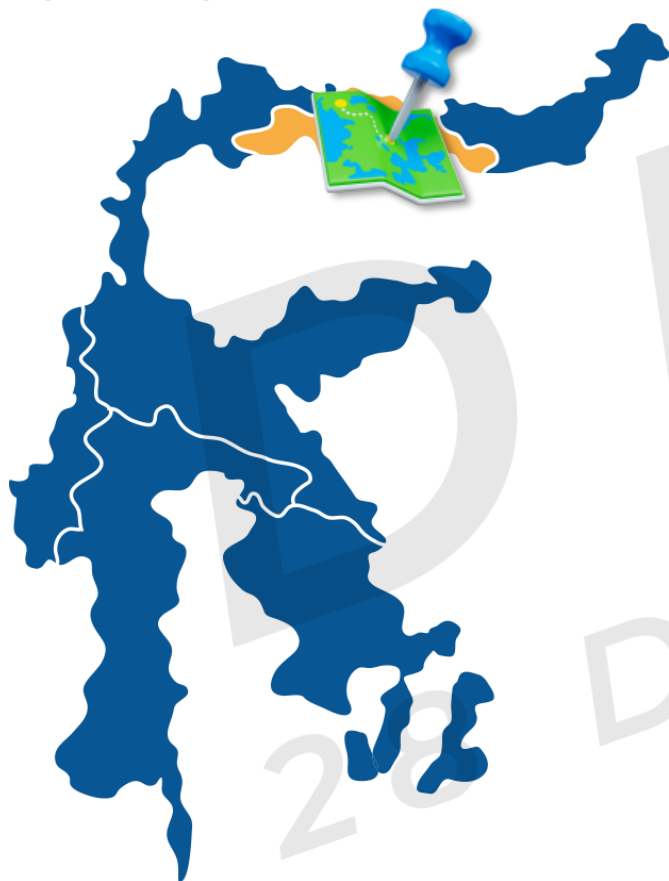
Supremasi Hukum

1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal;
2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti rumah layak huni, air minum dan sanitasi aman serta pengelolaan persampahan;
3. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;
4. **Pengendalian banjir dan sedimen di Kota Palu.**

Provinsi Gorontalo (1/2)



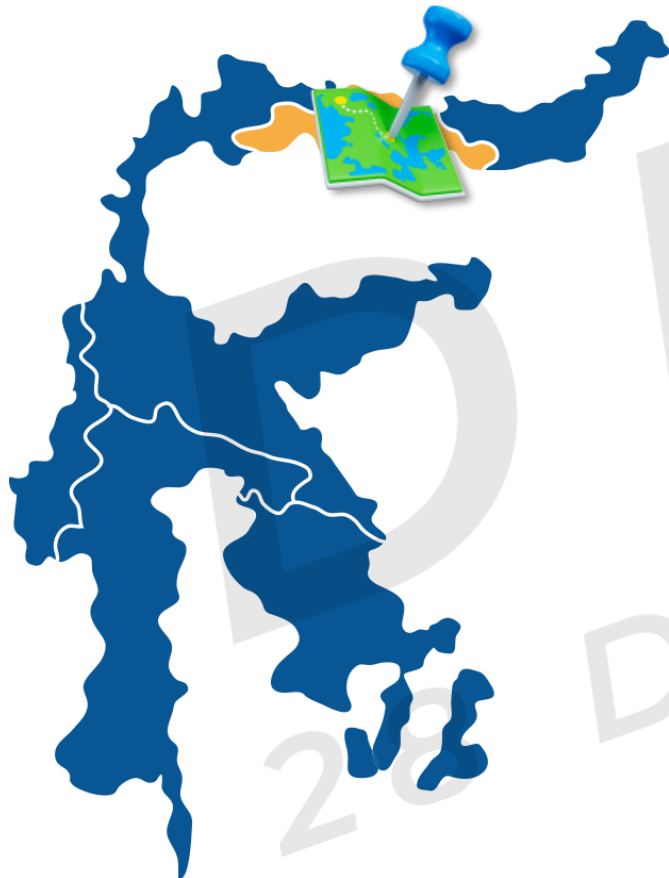
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,2 – 0,2	5,3 – 5,5	13,13 – 13,63	0,411 – 0,415	2,03 – 2,77
2029	0,2 – 0,2	5,9 – 6,8	9,25 – 9,75	0,404 – 0,407	2,01 – 2,80

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga medis dan kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan bergerak, penyiapan sistem <i>telemedicine</i>, dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat; 2. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan melalui penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun, pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah, dan penyediaan afirmasi akses Pendidikan; 3. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor tanaman pangan dan perkebunan yang berkelanjutan; 2. Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan dan perkotaan sebagai sentra pengembangan komoditas unggulan provinsi; 3. Penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi, sesuai kebutuhan di tiap regional; 4. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Gorontalo untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi seperti Pelabuhan Gorontalo/Anggrek; 5. Pengembangan Bandara Djalaluddin Gorontalo dan integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas; 6. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis minihidro.

Provinsi Gorontalo (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,2 – 0,2	5,3 – 5,5	13,13 – 13,63	0,411 – 0,415	2,03 – 2,77
2029	0,2 – 0,2	5,9 – 6,8	9,25 – 9,75	0,404 – 0,407	2,01 – 2,80

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan <i>smart government</i>, dan peningkatan kapasitas aparatur.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal; 2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti rumah layak huni, air minum dan sanitasi aman, serta pengelolaan persampahan; 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 3. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting; 4. Integrasi pendekatan struktural dan non-struktural dengan menerapkan <i>nature based solution</i> untuk mereduksi banjir di Kota Gorontalo.

Provinsi Sulawesi Selatan (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	3,3 – 3,3	6,5 – 6,8	5,90 – 6,40	0,371 – 0,376	3,46 – 4,18
2029	3,2 – 3,2	7,2 – 8,3	3,74 – 4,24	0,364 – 0,366	3,29 – 4,07

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

1. Pencegahan *stunting* pada wilayah rawan serta penyuluhan program pengentasan *stunting*;
2. Percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria, tuberculosis, dan pneumonia;
3. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
4. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Ekonomi

1. Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
2. Penyiapan peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Selatan WM Mamminasata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
3. Peningkatan konektivitas darat, udara, dan laut sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia (**melanjutkan pengerjaan kereta antar kota Makassar – Parepare, Pelabuhan Makassar, Jalan Trans Sulawesi dan pengembangan bandara utama Sultan Hasanuddin**);
4. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
5. Pengembangan pasokan listrik dan jaringan listrik cerdas (*smart grid*) serta pengembangan sistem interkoneksi dalam meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik;
6. Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal;
7. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola;
8. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Provinsi Sulawesi Selatan (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	3,3 – 3,3	6,5 – 6,8	5,90 – 6,40	0,371 – 0,376	3,46 – 4,18
2029	3,2 – 3,2	7,2 – 8,3	3,74 – 4,24	0,364 – 0,366	3,29 – 4,07

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; 3. Perbaikan data persampahan dan Penguatan Ekosistem untuk reformasi kelembagaan, perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 2. Transformasi sistem penuntutan menuju <i>single prosecution system</i> dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai <i>advocate general</i>.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir; 3. Pengembangan irigasi di WS Walanae-Cenranae, Saddang untuk mendukung lumbung pangan; 4. Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik; 5. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Jenelata serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Provinsi Sulawesi Tenggara (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,8 – 0,8	6,1 – 6,7	8,62 – 9,12	0,365 – 0,371	2,39 – 3,12
2029	0,8 – 0,8	6,8 – 8,1	5,85 – 6,35	0,358 – 0,359	2,45 – 3,24

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengentasan <i>stunting</i>; 2. Percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria, tuberculosis, dan pneumonia; 3. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya; 4. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan aspal, serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap dan budidaya) berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; 2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (<i>eco-tourism</i>); 3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri sebagai wadah industri pengolahan dalam mendukung perekonomian provinsi; 4. Penuntasan daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi berkecepatan tinggi dan adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan; 5. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal pada Kota Besar (Kendari) dan Kota Sedang (Kota Bau-Bau) yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang; 6. Pembangunan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara); 7. Interkoneksi transmisi Sistem Sultra-Raha-Baubau dan penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal.

Provinsi Sulawesi Tenggara (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,8 – 0,8	6,1 – 6,7	8,62 – 9,12	0,365 – 0,371	2,39 – 3,12
2029	0,8 – 0,8	6,8 – 8,1	5,85 – 6,35	0,358 – 0,359	2,45 – 3,24

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal; 2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir; 2. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Pelosika serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air.

Provinsi Sulawesi Barat



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,3 – 0,3	4,1 – 4,8	7,51 – 8,01	0,345 – 0,349	1,06 – 1,80
2029	0,2 – 0,2	5,5 – 6,8	4,22 – 4,72	0,338 – 0,339	1,08 – 1,88

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penanganan <i>stunting</i> dan percepatan eliminasi penyakit menular; 2. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan melalui penerapan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun, pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah, dan penyediaan afirmasi akses pendidikan.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya; 2. Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk pengembangan produk unggulan; 3. Penuntasan pemenuhan kebutuhan keterjangkauan layanan komunikasi berkecepatan tinggi; 4. Peningkatan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh; 5. Pengembangan pelabuhan Belang-belang; 6. Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal.
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan <i>smart government</i>, dan peningkatan kapasitas aparatur.
Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal; 2. Penguatan kerjasama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti rumah layak huni, air minum dan sanitasi aman serta pengelolaan persampahan; 3. Pengembangan irigasi multikomoditas di WS Kalukku – Karama.

04.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

Tema Pembangunan:

Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia.

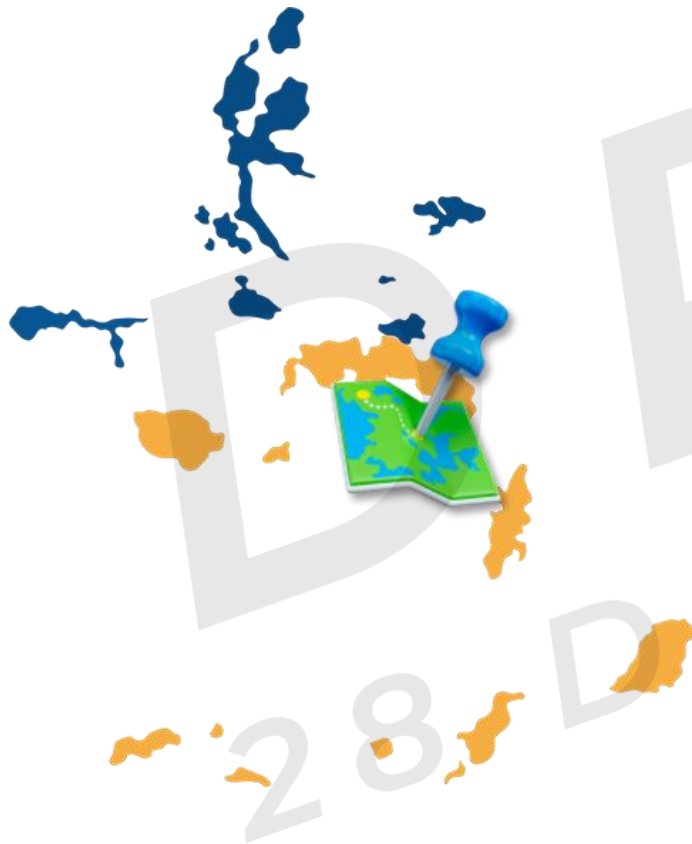


Tema Pembangunan Pulau Maluku: Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia



No	Provinsi	Tema
1	Maluku Utara	Pusat industri nikel, sentra perkebunan, serta destinasi pariwisata kelas dunia.
2	Maluku	Pusat kemaritiman, sentra perikanan dan perkebunan, lumbung energi, serta destinasi pariwisata bahari berkelanjutan.

Provinsi Maluku (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU

Pusat kemaritiman, sentra perikanan dan perkebunan lumbung energi, serta destinasi pariwisata berkelanjutan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,3 – 0,3	5,0 – 5,6	13,01 – 13,51	0,282 – 0,287	5,49 – 6,20
2029	0,3 – 0,3	5,5 – 6,7	8,28 – 8,78	0,275 – 0,277	5,33 – 6,10

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) dan sistem telemedicine berbasis gugus pulau; • Pengembangan SDM berbasis kemaritiman, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan penyiapan program-program studi pendidikan tinggi STEAM (<i>science, technology, engineering, arts, mathematics</i>) sesuai kebutuhan DUDI (dunia usaha dunia industri); • Percepatan pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • (a) Penguatan sentra perikanan (prioritas perikanan tangkap: tuna, cakalang, tongkol; dan perikanan budidaya: rumput laut), perkebunan (prioritas kelapa, pala, cengkeh), dan kawasan pariwisata eksisting; (b) pengembangan kawasan potensial berbasis kemaritiman, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) inisiasi pengembangan embrio industri kemaritiman yang didukung oleh pengembangan pusat riset, inovasi dan teknologi; • Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di wilayah Maluku (Blok Masela); • Penyiapan kawasan pariwisata prioritas dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara minat khusus di Kawasan Manusela-Masohi dan Kawasan Banda Neira; • Percepatan pemerataan dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas intra dan antar pulau, meliputi Pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan transit hub domestik, pusat logistik, dan pelabuhan <i>feeder</i>; • Pengembangan bandara utama Pattimura serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i>; • Penuntasan koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans pada pulau-pulau afirmasi ; • Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi serta sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>) kepulauan.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; • Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.

Provinsi Maluku (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU Pusat kemaritiman, sentra perikanan dan perkebunan lumbung energi, serta destinasi pariwisata berkelanjutan

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,3 – 0,3	5,0 – 5,6	13,01 – 13,51	0,282 – 0,287	5,49 – 6,20
2029	0,3 – 0,3	5,5 – 6,7	8,28 – 8,78	0,275 – 0,277	5,33 – 6,10

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan untuk pemberantasan praktik IUU fishing, di WPP 714 dan 718 (perbatasan dengan Timor Leste dan Australia); Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui antara lain intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dan obligasi biru.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pemanfaatan EBT sesuai potensi daerah terutama energi surya, angin, air, dan biomassa/biofuel; Penguatan pelestarian budaya lokal dan ikatan antarkelompok masyarakat serta keterlibatan tokoh adat/agama sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan; Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkap air, riset, dan inovasi sistem dan teknologi pertanian rendah karbon serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik/bluefood, hewani, sayur, dan buah; Pembangunan tampungan air serba guna dan pemanfaatan bendungan terbangun yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat; Pengamanan pesisir pulau kecil terluar.

Provinsi Maluku Utara (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA

Pusat Industri Nikel, Sentra Perkebunan, serta Destinasi Pariwisata Kelas Dunia

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,5 – 0,5	17,2 – 17,9	2,43 – 2,93	0,294 – 0,297	3,10 – 3,83
2029	0,8 – 0,8	14,0 – 15,0	1,17 – 1,67	0,287 – 0,289	2,88 – 3,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak dan sistem <i>telemedicine</i> berbasis gugus pulau; • Pengembangan SDM berbasis kemaritiman, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan penyiapan program-program studi pendidikan tinggi STEAM (<i>science, technology, engineering, arts, mathematics</i>) sesuai kebutuhan DUDI (dunia usaha dunia industri); • Percepatan pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • (a) Penguatan sentra perikanan (prioritas perikanan tangkap: tuna, cakalang, tongkol; dan perikanan budidaya: rumput laut), perkebunan (prioritas kelapa, pala, cengkeh), dan kawasan pariwisata eksisting; (b) pengembangan kawasan potensial berbasis kemaritiman, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif; • Penguatan kawasan ekonomi dan hilirisasi industri hasil pertambangan nikel; • Pengembangan kawasan pariwisata prioritas dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Morotai dan Halmahera Selatan; • Percepatan pemerataan dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas intra dan antar pulau, meliputi Pelabuhan Ahmad Yani Ternate sebagai pelabuhan transit hub domestik, pusat logistik, dan pelabuhan <i>feeder</i>; • Pengembangan bandara utama Baabullah Ternate serta pengembangan bandara perairan dan <i>seaplane</i> Penuntasan koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans pada pulau-pulau afirmasi; • Pengembangan listrik terbarukan dan mengembangkan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>) kepulauan.
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; • Penguatan manajemen talenta (<i>talent pool</i>) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.

Provinsi Maluku Utara (2/2)

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA

Pusat Industri Nikel, Sentra Perkebunan, serta Destinasi Pariwisata Kelas Dunia

	%SHARE PDRB	%LPE	%KEMISKINAN	GINI RATIO	%TPT
2025	0,5 – 0,5	17,2 – 17,9	2,43 – 2,93	0,294 – 0,297	3,10 – 3,83
2029	0,8 – 0,8	14,0 – 15,0	1,17 – 1,67	0,287 – 0,289	2,88 – 3,67

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan untuk pemberantasan praktik IUU fishing, di WPP 716 dan 717 (perbatasan Filipina dan Palau);
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui antara lain intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dan obligasi biru.

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

- Mendorong pemanfaatan EBT sesuai potensi daerah terutama energi surya, panas bumi, angin, dan biomassa/biofuel;
- Penguatan pelestarian budaya lokal dan ikatan antarkelompok masyarakat serta keterlibatan tokoh adat/agama sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan;
- Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkap air, riset, dan inovasi sistem dan teknologi pertanian rendah karbon serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik/bluefood, hewani, sayur, dan buah;
- Pembangunan bendungan Wairoro dan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat;
- Pengamanan pesisir pulau kecil terluar.

ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

Tema Pembangunan:

Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju
Papua Sehat, Cerdas dan Produktif.

Tema Pembangunan Pulau Papua: Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif



No	Provinsi	Tema
1	Papua Barat	Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Industri Kimia Dasar, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium
2	Papua	Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Logistik, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium
3	Papua Tengah	Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Industri Emas-Tembaga-Perak, serta Destinasi Pariwisata Minat Khusus Premium
4	Papua Pegunungan	Sentra Industri Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Minat Khusus
5	Papua Selatan	Sentra Industri Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta Destinasi Pariwisata Budaya
6	Papua Barat Daya	Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Perdagangan, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium

Provinsi Papua Barat (1/2)

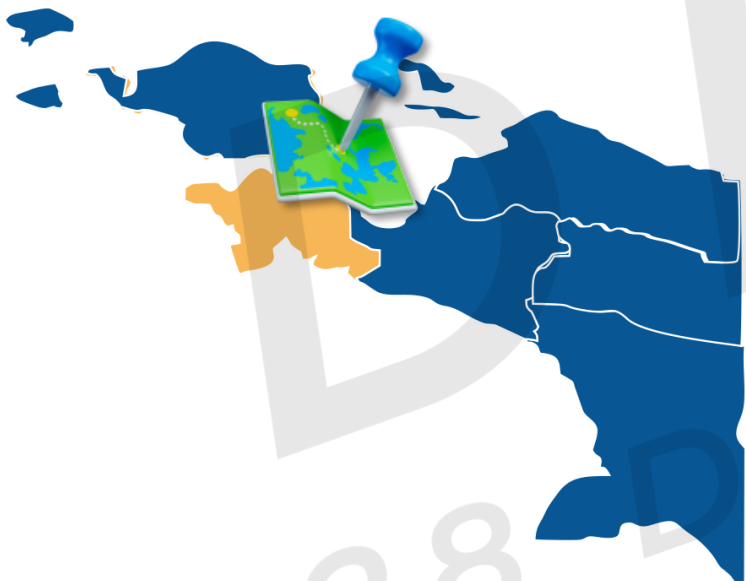
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Industri Kimia Dasar, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,3 – 0,3	3,7 – 4,0	17,62 – 18,12	0,364 – 0,367	4,20 – 4,92
2029	0,3 – 0,3	4,1 – 4,8	14,01 – 14,51	0,357 – 0,360	3,38 – 4,38

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua Barat sebelum pemekaran



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP, pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) berbasis pesisir, dataran, dan pegunungan, serta peningkatan pelayanan <i>telemedicine</i>; Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua; Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya); Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis; Percepatan peningkatan konektivitas dan akses terhadap pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kakao dan pala), serta perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar, penyiapan hilirisasi industri berbasis migas dan kimia dasar, serta optimalisasi kawasan strategis berbasis industri eksisting; Peningkatan literasi digital bagi masyarakat, penciptaan keamanan informasi dan siber, serta peningkatan kemampuan SDM digital atau digital skill terutama bagi OAP; Penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai <i>transshipment</i> hub domestik melalui pengembangan Pelabuhan Manokwari; Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pengembangan bandara utama Rendani, penyiapan bandara perairan, dan standarisasi <i>airstrip</i>, dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik serta pengembangan sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>).
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; Peningkatan pendidikan anti korupsi serta transparansi pada prosesi perencanaan, penganggaran, pengadaan jasa-jasa, dan layanan perizinan berbasis digital dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi; Peningkatan kompetensi ASN sesuai standar melalui pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan broadband yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok;

Provinsi Papua Barat (2/2)

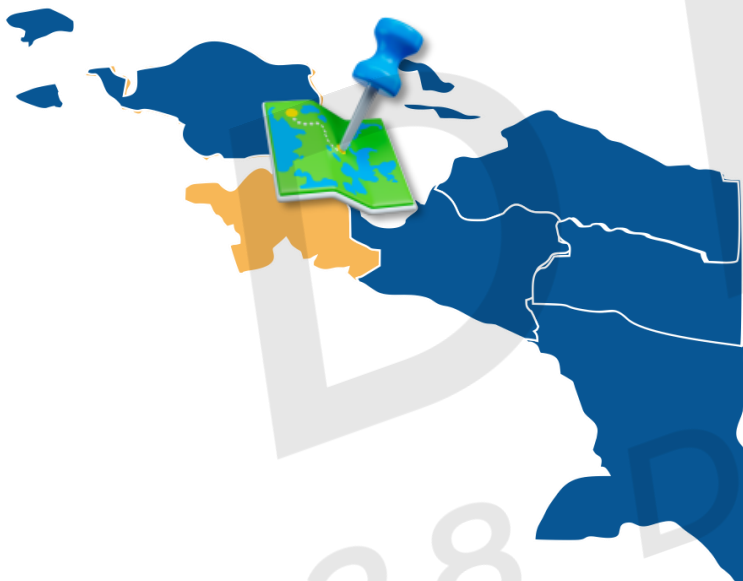
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Industri Kimia Dasar, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,3 – 0,3	3,7 – 4,0	17,62 – 18,12	0,364 – 0,367	4,20 – 4,92
2029	0,3 – 0,3	4,1 – 4,8	14,01 – 14,51	0,357 – 0,360	3,38 – 4,38

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua Barat sebelum pemekaran



Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Peningkatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus berbasis kinerja, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat serta kerja sama antarpemangku kepentingan;
- Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial.

Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

- Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam Pembangunan;
- Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkuler;
- Penyiapan sentra produksi pangan sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif;
- Pembangunan tumpungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.

Provinsi Papua (1/2)

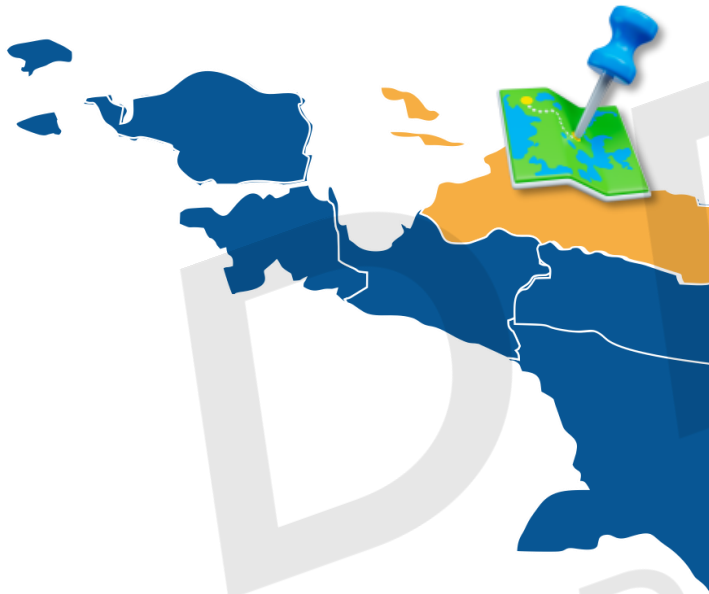
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Logistik, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,4 – 0,4	6,2 – 6,5	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,4 – 0,5	6,8 – 7,1	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran



Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) berbasis pesisir, kepulauan, dataran, dan pegunungan;
- Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan Provinsi Papua (pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata);
- Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);
- Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.

Ekonomi

- Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kakao dan kelapa), serta perikanan (prioritas: tuna, cakalang, tongkol, dan perikanan pelagis kecil) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BumKam, dan pasar;
- Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian, perikanan, dan pariwisata;
- Penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Asia Timur melalui pengembangan Pelabuhan Biak dan ke kawasan Pasifik melalui pengembangan Pelabuhan Depapre;
- Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pengembangan bandara utama Sentani, penyiapan bandara perairan, dan standarisasi *airstrip*;
- Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem interkoneksi serta sistem terisolasi (*isolated grid*).

Provinsi Papua (2/2)

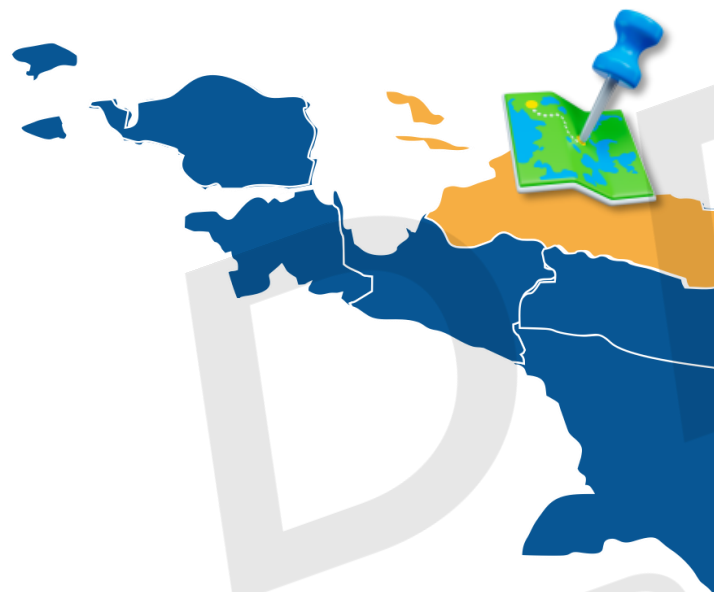
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA

Sentra Industri Perkebunan dan Perikanan, Pusat Logistik, serta Destinasi Pariwisata Bahari Premium

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,4 – 0,4	6,2 – 6,5	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,4 – 0,5	6,8 – 7,1	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan/ Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik, terutama pada Orang Asli Papua (OAP), hingga ke tingkat kampung; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan <i>broadband</i> yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok;
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan IUU Fishing, terutama pada perbatasan perairan di WPP 717; Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan <i>broadband</i> yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan; Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama; Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan; Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan 100 persen sampah terangkut serta tertangani di TPST sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkuler; Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. Pengamanan pesisir pulau kecil terluar.

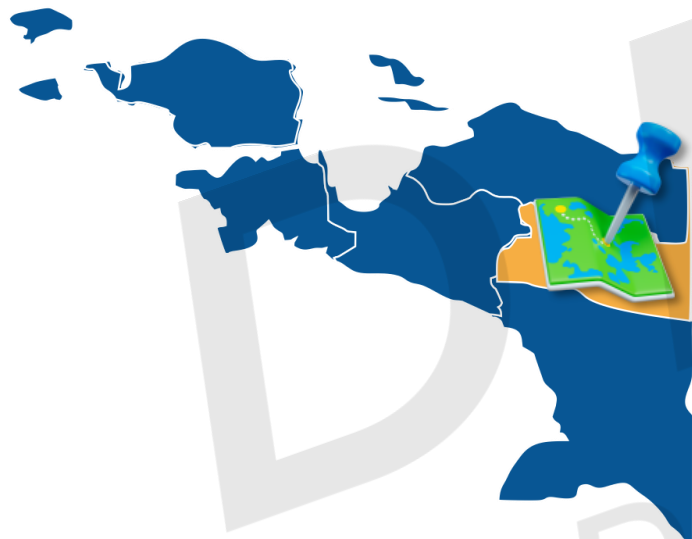
Provinsi Papua Pegunungan (1/2)

Tema Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Sentra Industri Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Minat Khusus

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,1 – 0,1	5,4 – 5,6	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,1 – 0,1	6,2 – 6,5	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran



Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) berbasis dataran dan pegunungan;
- Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah alam (*culture based learning*), sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan penyiapan pengadaan prodi Perguruan Tinggi di bidang STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
- Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);
- Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.

Ekonomi

- Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kopi) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar;
- Pengembangan ekonomi kreatif, terutama kopi Arabika Baliem Wamena;
- Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah;
- Peningkatan konektivitas intra dan antarmasyarakat melalui pengembangan bandara utama Wamena dan standarisasi *airstrip*;
- Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem terisolasi (*isolated grid*).

Provinsi Papua Pegunungan (2/2)

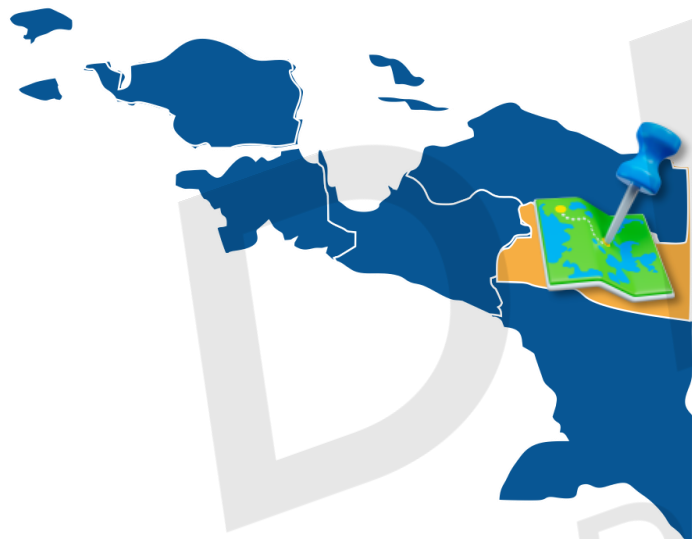
TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Sentra Industri Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Minat Khusus

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,1 – 0,1	5,4 – 5,6	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,1 – 0,1	6,2 – 6,5	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

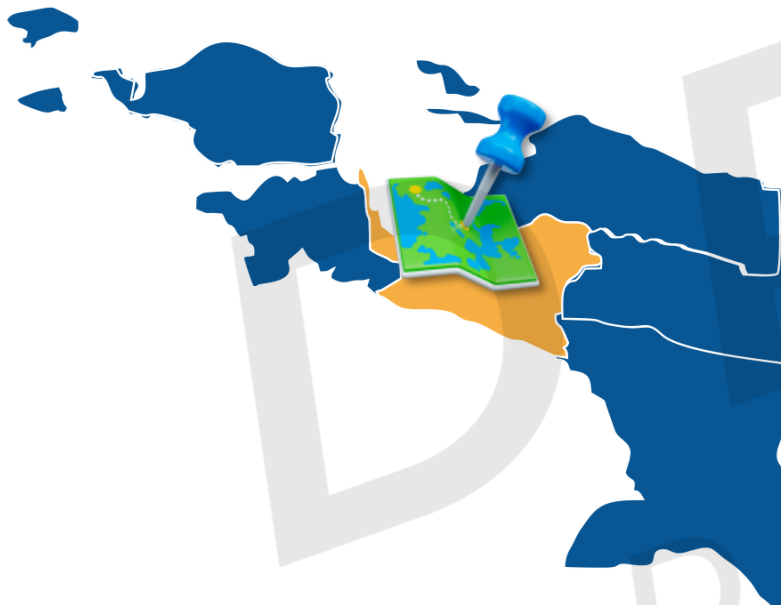
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran



Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik, terutama pada Orang Asli Papua (OAP), hingga ke tingkat kampung; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan <i>broadband</i> yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok.
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pemberdayaan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus berbasis kinerja, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama; Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan; Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah; Penyediaan rantai layanan sanitasi aman sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah; Pemicuan perubahan perilaku untuk mempraktikkan PHBS; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan 100 persen sampah terangkut serta tertangani di TPST sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkular; Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.

Provinsi Papua Tengah (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Sentra industri perkebunan dan perikanan, pusat industri emas-tembaga-perak, dan destinasi pariwisata minat khusus premium

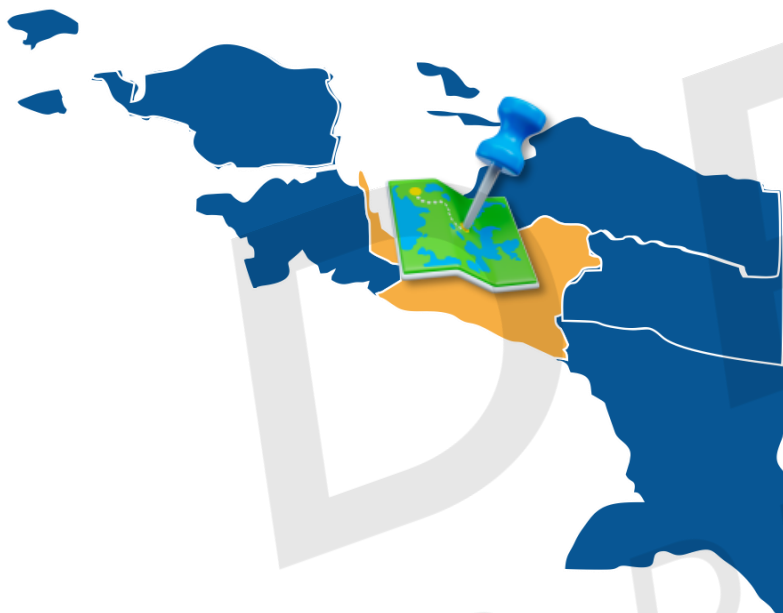
	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,8 – 0,8	8,2 – 8,5	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,8 – 0,9	9,1 – 9,5	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP, pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) berbasis pesisir, dataran, dan pegunungan, serta peningkatan pelayanan <i>telemedicine</i>; Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah alam (<i>culture based learning</i>), sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua; Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya); Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis; Percepatan peningkatan konektivitas dan akses terhadap pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kopi) serta perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar; Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata; Penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai transshipment hub domestik melalui pengembangan Pelabuhan Amamapare; Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pengembangan bandara utama Nabire Baru dan Mozes Kilangin dan standarisasi <i>airstrip</i>, dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>).
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; Peningkatan pendidikan anti korupsi serta transparansi pada prosesi perencanaan, penganggaran, pengadaan jasa-jasa, dan layanan perizinan berbasis digital dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi; Pengadaan dan peningkatan kompetensi ASN sesuai standar melalui pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan broadband yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok.

Provinsi Papua Tengah (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Sentra industri perkebunan dan perikanan, pusat industri emas-tembaga-perak, dan destinasi pariwisata minat khusus premium

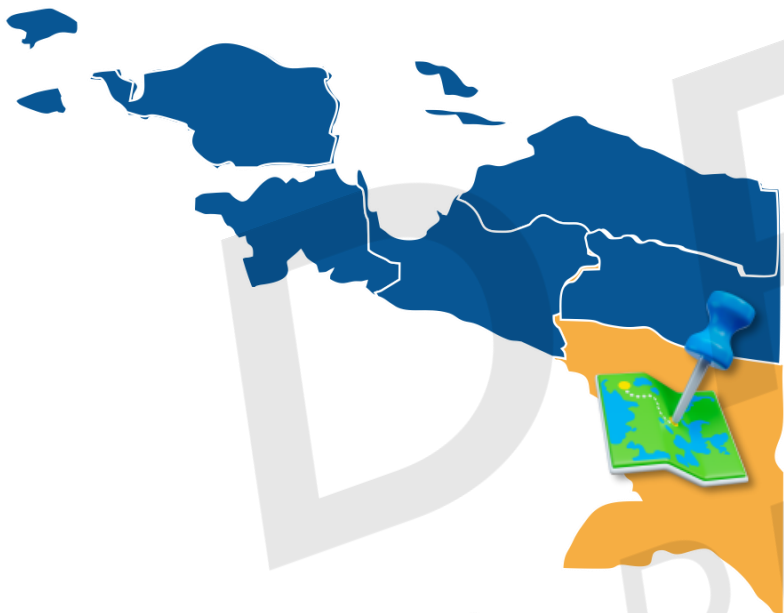
	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,8 – 0,8	8,2 – 8,5	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,8 – 0,9	9,1 – 9,5	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus berbasis kinerja, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan IUU Fishing, terutama pada perbatasan perairan di WPP 717 dan 718; Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan; Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana khususnya banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan kekeringan khususnya di wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan, serta kawasan prioritas melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam; Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkular; Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah; Penyediaan rantai layanan sanitasi aman sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah; Pemicuan perubahan perilaku untuk mempraktikkan PHBS; Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.

Provinsi Papua Selatan (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN

Sentra industri pertanian, perkebunan, dan perikanan,
serta destinasi pariwisata budaya

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,2 – 0,2	6,0 – 6,2	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,2 – 0,2	6,6 – 6,8	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran

Transformasi

Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi

Sosial

- Pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) berbasis pesisir, dataran, dan rawa;
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan penyiapan pengadaan prodi Perguruan Tinggi di bidang STEAM yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata;
- Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (*life skills*) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya);
- Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua;
- Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.

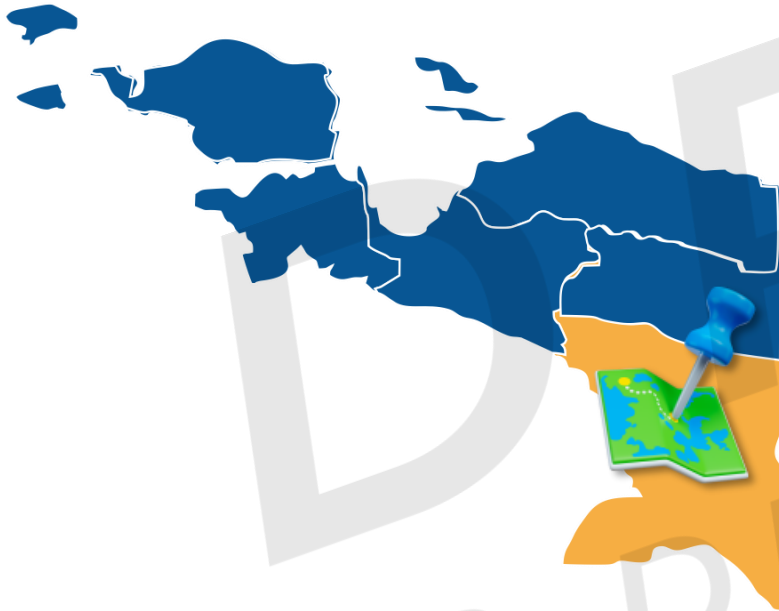
Ekonomi

- Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: sagu), serta perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar;
- Pengembangan ekonomi kreatif, terutama seni ukir kayu Asmat;
- Penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke;
- Penyiapan sentra produksi pangan/*food estate* sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif;
- Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem terisolasi (*isolated grid*).

Tata Kelola

- Peningkatan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik, terutama pada Orang Asli Papua (OAP), hingga ke tingkat kampung;
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan *broadband* yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok.

Provinsi Papua Selatan (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN

Sentra industri pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta destinasi pariwisata budaya

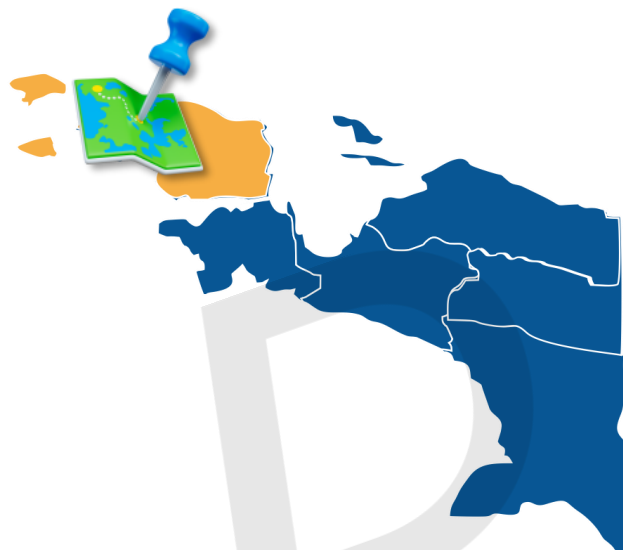
	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,2 – 0,2	6,0 – 6,2	23,15 – 23,65	0,380 – 0,383	1,87 – 2,60
2029	0,2 – 0,2	6,6 – 6,8	19,84 – 20,34	0,373 – 0,375	1,60 – 2,62

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua sebelum pemekaran

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan IUU <i>Fishing</i>, terutama pada perbatasan perairan di WPP 718; Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pemberdayaan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus berbasis kinerja, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama; Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan; Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah Penyediaan rantai layanan sanitasi aman sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah; Pemicuan perubahan perilaku untuk mempraktikkan PHBS; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan 100 persen sampah terangkut serta tertangani di TPST sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkular; Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.

Provinsi Papua Barat Daya (1/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Sentra industri perkebunan dan perikanan, pusat perdagangan,
serta destinasi pariwisata bahari premium

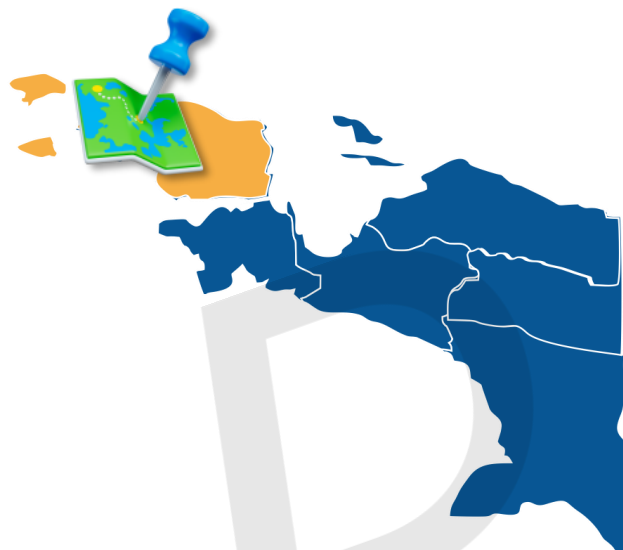
	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,2 – 0,2	4,2 – 4,5	17,62 – 18,12	0,364 – 0,367	4,20 – 4,92
2029	0,2 – 0,2	4,6 – 5,5	14,01 – 14,51	0,357 – 0,360	3,38 – 4,38

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua Barat sebelum pemekaran

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP, pemenuhan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>) berbasis pesisir, dataran, dan pegunungan, serta peningkatan pelayanan <i>telemedicine</i>; Penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual Papua Peningkatan literasi tahap awal dan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (<i>life skills</i>) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya); Pemenuhan sarana prasarana penunjang fasilitas kesehatan, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis; Percepatan peningkatan konektivitas dan akses terhadap pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kelapa dan sagu), dan perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar, serta optimalisasi kawasan strategis berbasis industri eksisting; Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan (prioritas: kelapa dan sagu), dan perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, dan tongkol) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BUMKam, dan pasar; Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara; Peningkatan <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian, perikanan, dan pariwisata; Penyiapan pelabuhan simpul utama sebagai transshipment hub domestik melalui pengembangan Pelabuhan Sorong; Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pengembangan bandara utama Domine Edward Osok, penyiapan bandara perairan, dan standarisasi <i>airstrip</i>, dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>).
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah; Peningkatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dalam rangka penguatan aspek pemerintahan digital; Pengadaan dan peningkatan kompetensi ASN sesuai standar melalui pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui perluasan jaringan <i>broadband</i> yang menjangkau hingga ke seluruh pelosok.

Provinsi Papua Barat Daya (2/2)



TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Sentra industri perkebunan dan perikanan, pusat perdagangan, serta destinasi pariwisata bahari premium

	%SHARE PDRB ^{a)}	%LPE ^{a)}	%KEMISKINAN ^{b)}	GINI RATIO ^{b)}	%TPT ^{b)}
2025	0,2 – 0,2	4,2 – 4,5	17,62 – 18,12	0,364 – 0,367	4,20 – 4,92
2029	0,2 – 0,2	4,6 – 5,5	14,01 – 14,51	0,357 – 0,360	3,38 – 4,38

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Target dihitung berdasarkan agregasi PDRB Kabupaten/Kota setelah ditetapkan Provinsi DOB Papua
 b) Menggunakan target dari Provinsi Induk Papua Barat sebelum pemekaran

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat serta kerja sama antarpemangku kepentingan; Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial; Peningkatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus berbasis kinerja, dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan; Peningkatan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana; Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta peningkatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama; Percepatan pemenuhan akses air minum dan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah; Penyediaan rantai layanan sanitasi aman sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah; Pemicuan perubahan perilaku untuk mempraktikkan PHBS; Peningkatan akses terhadap infrastruktur persampahan melalui penyediaan layanan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir sesuai karakteristik wilayah dengan berorientasi pada ekonomi sirkular; Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.



Kementerian PPN/
Bappenas

05.

KERANGKA IMPLEMENTASI KAIDAH PELAKSANAAN

■ KONSEP RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2025-2029

Kerangka Kelembagaan

Dasar

1. Visi-Misi Presiden
2. RPJP Nasional 2025-2045
3. Arahannya Presiden/Menteri
4. Amanat Perundang-Undangan
5. SDG's

Ruang Lingkup

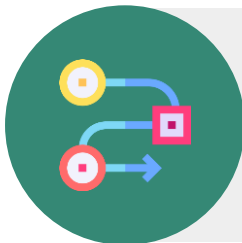
1. Penataan Proses Bisnis
2. Penataan Struktur

Prinsip

1. Mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, prioritas pembangunan, dan visi-misi Presiden;
2. Mengacu pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan (kerangka regulasi);
3. Mengutamakan penguatan tugas dan fungsi, proses bisnis dan koordinasi;
4. Kelembagaan *ad-hoc* perlu fokus pada penguatan kapabilitas, cara kerja, dan pengelolaan kinerja;
5. Efektif, efisien dan transparan;
6. Mendukung dan mewujudkan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan;
7. Disusun berdasarkan evaluasi kelembagaan.

Kerangka Regulasi

Urgensi Kerangka Regulasi



Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan **sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional**.



Meningkatkan **efisiensi pengalokasian anggaran** untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.



Meningkatkan **kualitas peraturan perundang-undangan** dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.

Kriteria Usulan KR RPJMN Tahun 2025-2029

1. Mendukung Agenda Pembangunan

- Usulan RUU yang mendukung pencapaian agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN dan/atau narasi rancangan teknokratik RPJMN.

2. Merupakan Inisiatif Pemerintah

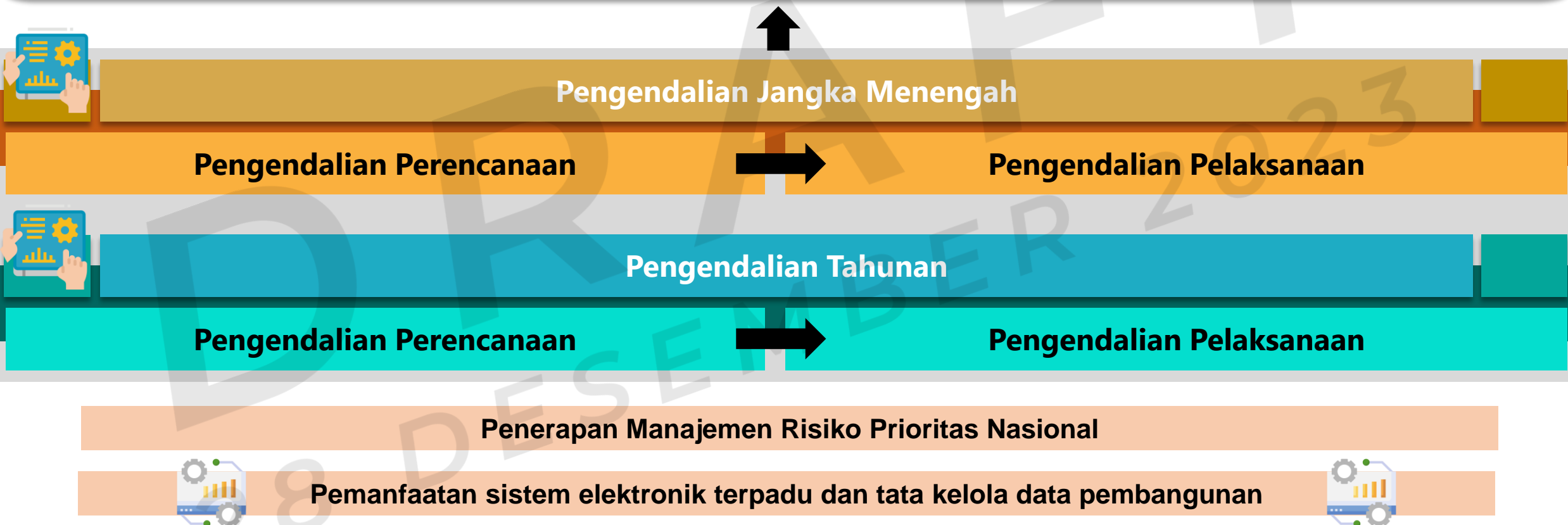
- RUU merupakan inisiatif pemerintah
- Apabila RUU yang diusulkan merupakan inisiatif DPR/DPD, maka mengikuti tata cara pengusulan yang diatur pada Peraturan DPR, tidak perlu dicantumkan dalam KR RPJMN.

3. Target Penyelesaian yang Jelas

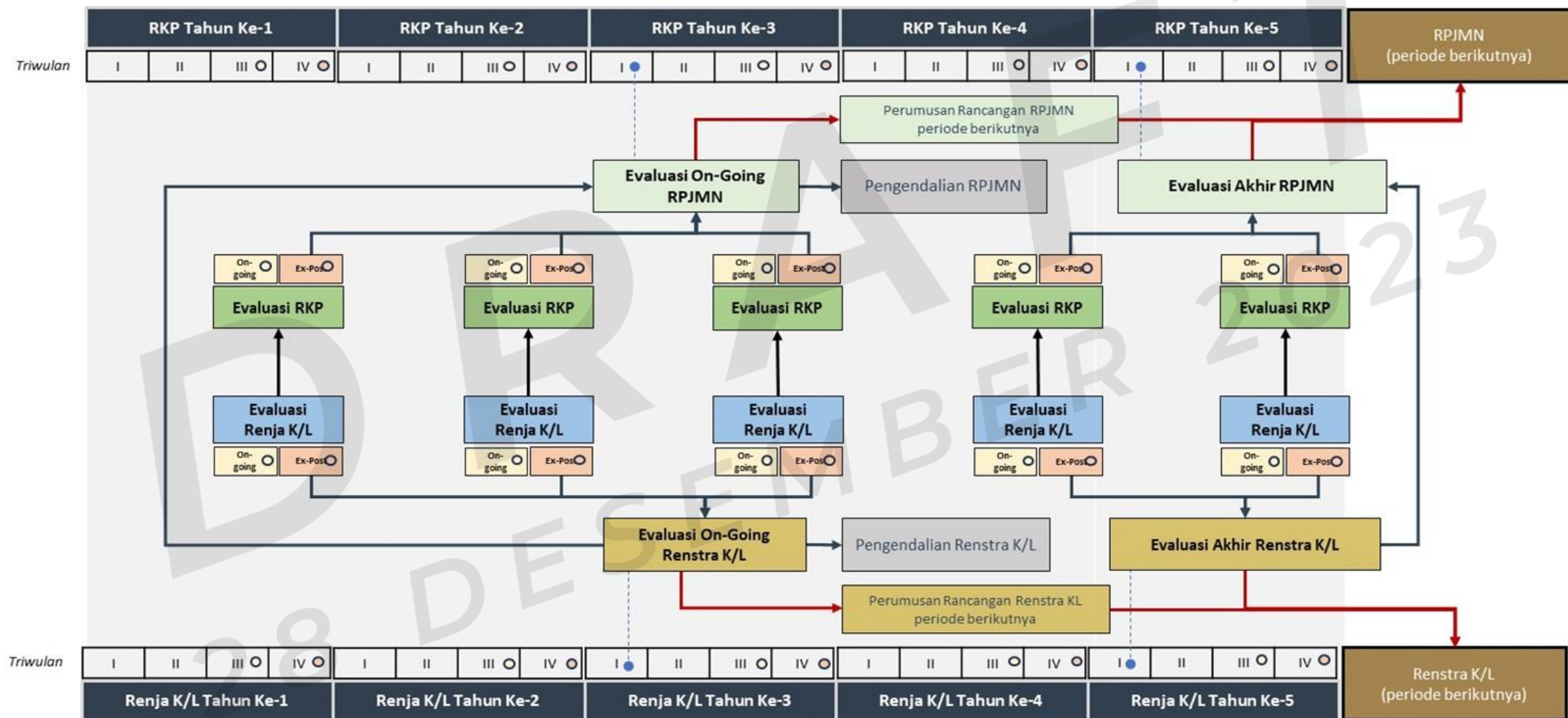
- Waktu penyelesaian Kerangka Regulasi yang harus selesai dalam periode waktu RPJMN Tahun 2025-2029.
- Target penyelesaian tahapan pembentukan PUU yang jelas.

Kerangka Evaluasi dan Pengendalian (1/2) Pengendalian Pembangunan Berbasis Manajemen Risiko

PENGENDALIAN RPJPN TAHUN 2025-2045



Kerangka Evaluasi dan Pengendalian (2/2)



→ Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan evaluasi
→ Hasil evaluasi digunakan sebagai input perencanaan berikutnya

*Permen PPN No.1/2023

Sumber: Peraturan Menteri PPN No.1/2023

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TERIMA KASIH

